



Swantara

Majalah Triwulan Lemhannas RI No. 28 Tahun VII / Maret 2019



**Marsdya TNI Wieko Syofyan Gantikan
Marsdya TNI Bagus Puruhito sebagai Wakil Gubernur
Lemhannas RI**

**Jelang Pemilu, Lemhannas Diskusi dengan
Pemred Media Massa**



2019
PEMILIHAN UMUM

INGAT!!

RABU

17
April 2019

**PEMILU
SERENTAK**



PELINDUNG AGUS WIDJOJO
PEMBINA BAGUS PURUHITO
PENGARAH MOCHAMAD IRIAWAN
PENANGGUNG JAWAB/PEMIMPIN REDAKSI MINDARTO
REDAKTUR SUGENG SANTOSO
DESAIN GRAFIS
BAMBANG IMAN ARYANTO, YANWAR ABIDIN RAKINDA
KOORDINATOR FOTOGRAFER M. ISDAR
FOTOGRAFER SURYADI, SUYONO
SEKRETARIAT SUPARMO, HERU SEPTOWIDODO, GATOT,
MARDIANA PRIHATINI, YUSNADI, DASWATI,
YATIK WULANDARI
PENULIS ARTIKEL
ENDAH HELIANA, CAHYAQADRI HILDAMONA,
MAGISTA DIAN, NI MADE VIRA

ALAMAT REDAKSI BIRO HUMAS LEMHANNAS RI
JL. MEDAN MERDEKA SELATAN NO. 10 JAKARTA 10110
TELP. (021) 3832108, 3832109
FAX (021)-3451926
EMAIL : humas@lemhannas.go.id
WEBSITE : www.lemhannas.go.id

ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN

SWANTARA MENERIMA ARTIKEL DAN OPINI DARI LUAR
LEMHANNAS RI DAN AKAN DIMUAT APABILA
SESUAI DENGAN KEBIJAKAN REDAKSI

Catatan Redaksi

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Om Swasti Astu

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya Majalah Swantara Edisi ke-28 bulan Maret 2019, kembali hadir di tengah-tengah para pembaca.

Pada edisi ke-28 ini, redaksi terus berusaha meningkatkan kualitas pemberitaan agar dapat memberikan informasi yang dapat mengedukasi bagi para pembaca, serta dapat memberikan pesan yang sarat makna kepada para pembaca. Pada edisi kali ini, redaksi mengangkat pemberitaan mengenai diskusi antara Lemhannas RI dengan pimpinan redaksi media massa dalam artikel “Jelang Pemilu, Lemhannas Diskusi dengan Pemred Media Massa”. Selain itu, pada akhir Maret 2019, Lemhannas RI resmi membuka pendidikan PPSA XXII yang diangkat dalam artikel “ Gubernur Lemhannas RI Buka PPSA XXII Lemhannas RI “. Redaksi juga mengulas penandatanganan memorandum saling pengertian dengan negara sahabat Nigeria, serta penandatanganan nota kesepahaman dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang.

Tak lupa kami ulas mengenai serah terima jabatan Wakil Gubernur Lemhannas RI kepada Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito kepada Marsdya TNI Wiekso Syofyan. Meski telah melakukan yang terbaik, akan tetapi redaksi menyadari bahwa tiada daging yang tak retak. Oleh karenanya, kami mengharapkan kritik dan masukan dari para pembaca demi eksistensi dan kemajuan karya jurnalistik yang akan kami sajikan pada edisi mendatang.

Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berperan dalam membantu terbitnya Majalah Swantara Edisi 28 kali ini.

Semoga, Majalah Swantara tetap berkesan di hati para pembaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Om



6 Lemhannas RI Peringati Hari Bela Negara



7 Lemhannas RI adakan Food Test



8 Pertemuan Rutin Perista Hadirkan Pakar Micro Expression



9 Perayaan Natal Lemhannas RI 2018



10 Kunjungan BPK Penabur ke Lemhannas RI



14 Perbedaan itu Biasa dan Wajar



15 Jaga Netralitas dalam Menyambut Tahun Politik 2019



16 Lemhannas RI Sosialisasikan PPRa Tahun 2020



17 Lemhannas RI Adakan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu



18 Gubernur Lemhannas RI Terima Kunjungan Alumni Universitas Samratulangi Manado



23 Konsil Kedokteran Indonesia Kunjungi Lemhannas RI



24 Serah Terima Jabatan Ketua Perista Lemhannas RI



25 Peringatan Hari Ibu: He for She, Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki



26 Workshop Usulan Keluaran Baru Perencanaan Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020



28 Reformasi Upaya Membangun Sistem Politik



34 Marsdya TNI Wieko Syofyan Gantikan Marsdya TNI Bagus Puruhito sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI



35 Awali Tahun 2019, Gubernur Lemhannas RI Ajak Seluruh Pegawai Untuk Tingkatkan Kinerja



36 Lemhannas RI Selenggarakan FGD Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga



38 Outbond PPRa LIX Memperkuat Kekompakan Peserta



39 Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR RI



43 Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber Dialog Wawasan Kebangsaan di Batam TV



44 RDP Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI



45 Jelang Pemilu, Lemhannas Diskusi dengan Pemred Media Massa



49 Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri Sukses diselenggarakan di Aceh



50 Kebutuhan Organisasi, Lemhannas RI Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat



12 Kepala Biro Humas Paparkan Pengenalan Lembaga Pada PPRA LIX Negara Sahabat

13 Lemhannas RI Gelar Konsolidasi Tenaga Kependidikan



19 Lemhannas RI Buka Pendidikan PPRA LIX Gubernur Tekankan Cara Berpikir Kritis

22 Lemhannas RI Tandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan NIPSS Nigeria



30 Perlunya Sistem yang Menumbuhsuburkan Kader Pemimpin

31 Taklimat Awal Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI

33 Peningkatan Kapasitas Strategi Pengajaran Karakter Bangsa



40 Renovasi Perluasan, Upaya Memakmurkan Masjid Sudirman Lemhannas RI

41 Pelatihan Membuat Power Point Untuk Pegawai Lemhannas RI

42 Lemhannas RI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang



51 Gubernur Lemhannas RI Buka PPSA XXII Lemhannas RI

54 OPINI Meningkatkan Peran Generasi Milenial Guna Menghadapi Persaingan Global

56 GALERI



Salam Ketahanan Nasional

Pada edisi ke-28 Maret 2019 ini, Lemhannas RI menyoroti kegiatan *Focus Group Discussion* dari Kedeputusan Pengkajian Strategik Lemhannas RI yang mengangkat tema mengenai Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga. Lemhannas RI berpandangan akan pentingnya fungsi keluarga di tengah era revolusi industri 4.0 ini. Mengutip Agus Sulaksono yang menyebutkan bahwa dengan mengangkat fungsi keluarga ke dalam kajian strategis Lemhannas RI, menjadi momentum yang tepat untuk menyikapi terjadinya degradasi moral dan karakter yang kini tengah terjadi di masyarakat kita.

Berbagai kegiatan terkait dengan program pendidikan dan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan telah dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas pimpinan Indonesia di berbagai level. Selanjutnya, Majalah Swantara juga memuat opini dari Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A., Alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Lemhannas RI yang saat ini sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Hankam Lemhannas RI. Anton mengangkat tulisan mengenai pentingnya peran generasi milenial dalam persaingan global "Meningkatkan Peran Generasi Milenial Guna Menghadapi Persaingan Global".

Dalam mewujudkan peran serta fungsinya, Lemhannas RI secara berkelanjutan menyusun berbagai program kegiatan antara lain seperti menyiapkan dan memantapkan kader-kader pimpinan nasional, menghasilkan rekomendasi kajian-kajian isu strategis, baik nasional maupun internasional, serta memantapkan nilai-nilai kebangsaan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kami berharap Majalah Swantara edisi ke-28 yang diterbitkan pada Maret 2019 ini dapat menjadi referensi bagi para pembaca dalam merespon kondisi perkembangan politik nasional maupun internasional.

Gubernur Lemhannas RI



Lemhannas RI Peringati Hari Bela Negara



Sege nap aparat ur negara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air sesungguhnya sedang melakukan Bela Negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya

- Menkopolhukam -

Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2018, Rabu (19/12) di Lapangan Tengah Lemhannas RI. Sejak diterbitkannya Keppres Nomor 28 Tahun 2006, setiap tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Bela Negara. Pada tanggal tersebut terjadi sebuah peristiwa sejarah yang besar yaitu pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, Belanda menyerang Indonesia dalam Agresi Militer II dan mereka mengumumkan bahwa Indonesia sudah tidak ada lagi. Presiden Soekarno dan Wapres Moh. Hatta yang ditangkap kemudian memberikan mandat kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kemakmuran RI agar mendirikan pemerintahan darurat yang dikenal dengan PDRI.

“Upaya politik dan diplomasi Mr. Syafrudin Prawiranegara terbukti berhasil mengatasi kekuatan militer penjajah, dan menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri tegak,” ungkap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM seperti yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhan-

nas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito yang menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bela Negara di Lemhannas.

Lebih lanjut dalam pidato Menkopolhukam yang dibacakan oleh Wagub Lemhannas dinyatakan bahwa penetapan Hari Bela Negara merupakan penegasan bahwa bela negara sejak dulu telah memiliki konteks yang sangat luas. Bela Negara tidak dapat hanya dilakukan dengan kekuatan fisik dan senjata semata, namun harus dilakukan melalui beragam upaya dan profesi.

“Sege nap aparat ur negara, baik sipil maupun militer, yang tengah berjuang melakukan tugasnya di pelosok Tanah Air sesungguhnya sedang melakukan Bela Negara. Merekalah yang telah membuat Republik ini bisa tetap eksis untuk hadir melayani rakyatnya,” kata Menkopolhukam.

Pada bulan September lalu, pemerintah telah menetapkan inpres tentang bela negara. “Inpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019 ini menggenapi perwujudan amanat Bela Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan tentang pertahanan negara,” jelas Menko.



Lemhannas RI adakan *Food Test*

Pokja Pengadaan Pelaksanaan Dukungan dan Pelayanan Peserta Lemhannas RI mengadakan *Food Test* dalam rangka memilih perusahaan penyedia konsumsi untuk para peserta pendidikan di Lemhannas RI pada tahun 2019. *Food Test* tersebut diselenggarakan di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lt I, Lemhannas RI, Selasa (8/1).

Food Test tersebut diikuti oleh dua Perusahaan yaitu PT. Agustina Sakti dan PT. Lotus Veora Sejati. Dua perusahaan penyedia konsumsi tersebut telah melalui proses lelang yang diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 25 Desember 2018 melalui website LPSE Lemhannas.

Dalam *Food Test* tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo beserta Ibu Niniek Agus Widjojo dan

wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdyia TNI Bagus Puruhito beserta Ibu Rina Bagus Puruhito turut serta mencicipi berbagai hidangan yang disediakan oleh kedua perusahaan penyedia jasa konsumsi.

Ir. Ita Endah Pertiwi, M.A. selaku Ketua Pokja mengatakan bahwa diantara sepuluh perusahaan yang mengikuti lelang, PT. Agustina Sakti dan PT. Lotus Veora Sejati adalah dua perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ke Lemhannas RI. Ita mengatakan di akhir *Food Test* nanti, diharapkan seluruh pejabat dan tamu undangan dapat memberikan penilaian terhadap kombinasi menu, cita rasa, dan peralatan serta saran dan juga masukan bagi kedua perusahaan jasa konsumsi tersebut. Di akhir acara, PT. Agustina Sakti dinyatakan sebagai perusahaan penyedia jasa konsumsi yang dipilih oleh Lemhannas RI.



Diantara sepuluh perusahaan yang mengikuti lelang, PT. Agustina Sakti dan PT. Lotus Veora Sejati adalah dua perusahaan yang memasukan dokumen penawaran ke Lemhannas.

Ir. Ita Endah Pertiwi, M.A.



Micro expression adalah cara membaca pikiran manusia dengan melihat mimik wajah dan body language yang ditampilkan oleh orang tersebut

- Poppy Amalya -



dok. humas/ri



Pertemuan Rutin Perista Hadirkan Pakar *Micro Expression*

Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI menggelar pertemuan rutin pertama di tahun 2019 pada Senin (11/1) di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lantai II, Lemhannas RI.

Pertemuan yang dibuka oleh ketua Perista, Ibu Ninik Agus Widjojo tersebut turut mengundang seluruh karyawati Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Perista Lemhannas RI mengundang Pakar *Micro Expression*, Poppy Amalya. Ninik Agus Widjojo mengatakan dalam sambutannya bahwa mengetahui ekspresi seseorang sangat penting agar tidak salah menafsirkan maksud dari ekspresi orang tersebut. Ninik juga memperkenalkan beberapa anggota baru Perista Lemhannas RI yang hadir pada acara tersebut.

Poppy Amalya dalam penjelasannya memperkenalkan bahwa *micro expression* adalah cara membaca pikiran manusia dengan melihat mimik wajah dan *body language* yang ditampilkan

oleh orang tersebut. *Micro expression* dilihat pada 0,4 detik di awal. Maka dari itu, jelas Poppy, diperlukan adanya bukti dengan merekam saat wawancara.

Poppy kemudian menjelaskan bahwa *micro expression* ditemukan pertama kali oleh Paul Ekman, seorang psikolog yang melakukan penelitian pada mimik wajah selama 50 tahun. Dari penelitian tersebut, jelas Poppy, ditemukan bahwa manusia memiliki mimik wajah sejak lahir sehingga bayi juga dapat mengekspresikan wajahnya.

Acara Perista tersebut kemudian ditutup dengan acara perpisahan singkat ibu Wakil Gubernur Meirina Bagus Puruhito yang akan berpindah tugas mengikuti Marsdya TNI Bagus Puruhito ke BNPP (Basarnas).



Perayaan Natal Lemhannas RI 2018



Kasih itu rendah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu memberi, natal adalah menyebarkan kasih Tuhan

- Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing -

Lemhannas RI menyelenggarakan perayaan Natal 2018 yang diselenggarakan pada Selasa (12/1) di Auditorium Gajah Mada, Gedung Panca Gatra.

Acara yang diawali pembukaan oleh Ketua Panitia Perayaan Natal Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing tersebut mengangkat tema “Hikmah Natal 2018 Kita Tingkatkan Motivasi dan Kompetensi Umat Kristiani Lemhannas RI”. Perayaan Natal tersebut dihadiri oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, Pejabat Struktural dan Fungsional Lemhannas RI, Staf Lemhannas RI serta tamu undangan beserta seluruh personel Lemhannas RI.

“Kasih itu rendah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu mengampuni, kasih itu memberi, natal adalah menyebarkan kasih Tuhan,” ujar Brigjen TNI Ramses Lumban Tobing selaku ketua panitia acara saat menyampaikan sambutan pada acara natal tersebut. Ramses kemudian mengatakan bahwa pada bulan penuh kasih, kita sering menjumpai berbagai momen – momen indah bersama orang – orang tersayang dan orang – orang terdekat seperti keluarga, teman atau orang lain yang memiliki hubungan kedekatan terhadap diri kita. Momen – Momen indah di tahun 2018 tersebut, jelas Ramses, adalah momen natal bersama keluarga dan orang terdekat.

Agus Widjojo dalam sambutannya mengucapkan selamat natal kepada para personel Lemhannas RI yang merayakan. “Melalui sambutan ini saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang kuasa karena pada pagi ini kita dapat menghadiri perayaan natal Lembaga Ketahanan Nasional RI tahun 2018, sehubungan dengan itu atas nama lembaga saya sampaikan selamat natal dan salam bahagia kepada umat kristiani Lemhannas RI dan sekalipun tahun 2019 sudah berjalan saya ucapkan selamat tahun baru 2019 bagi kita semua,” kata Agus Widjojo sambutannya.

Sementara itu Pendeta Yohanes Purba, M.Pdk. dalam khotbahnya mengatakan bahwa manusia harus terus bersyukur terhadap apapun ketetapan Tuhan. Pendeta Yohanes Purba juga berpesan agar terus menjaga hati dan lisan agar umat manusia selalu damai dan sejahtera, selalu berdoa kepada Tuhan dan terus berharap agar terhindar dari hal-hal yang tidak disukai oleh sang pencipta. Perayaan natal tersebut juga diisi dengan penampilan Vocal Grup Lemhannas RI, Trio Gracias, Paduan suara Divisi 1 Kosttrad untuk memeriahkan semarak perayaan natal dengan membawakan beberapa lagu pujian untuk menambah suasana semangat dan kehangatan natal.





Kunjungan BPK Penabur ke Lemhannas RI

Perwakilan dari Yayasan BPK Penabur yang dipimpin oleh Adri Lazuardi mengunjungi Lemhannas RI (14/1). Kunjungan tersebut diterima oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang didampingi oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito di Ruang Nusantara, Gedung Trigatra, Lemhannas RI.



Lemhannas RI memiliki tiga fungsi yaitu mendidik pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pengkajian strategik yang sesuai dengan core Lemhannas RI, serta melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan

- Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo -
Gubernur Lemhannas RI

Dalam kunjungan tersebut, bersama dua belas anggota perwakilan, Adri Lazuardi menyampaikan bahwa sebagai yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, BPK Penabur juga berfokus kepada pendidikan kebangsaan. Adri mengatakan bahwa pendidikan kebangsaan merupakan hal yang sangat penting diajarkan kepada para siswa yang berada di pendidikan dasar dan menengah karena sekolah merupakan garda terdepan dalam mendiseminasikan nilai-nilai kebangsaan.

Maka dari itu, BPK Penabur meminta arahan atau masukan dari Gubernur Lemhannas RI agar pendidikan nilai-nilai kebangsaan dapat masuk dalam proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, Adri juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang berfokus ke pembangunan manusia yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang berkualitas.

Menanggapi hal tersebut, Agus Widjojo kemudian menjelaskan bahwa Lemhannas RI memiliki tiga fungsi yaitu

mendidik calon pimpinan tingkat nasional, melaksanakan pengkajian strategik yang sesuai dengan *core* Lemhannas RI, serta melaksanakan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Salah satu program yang dapat membantu para guru, khususnya di BPK Penabur untuk mengajarkan nilai-nilai kebangsaan, adalah Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan dan *Training of Trainers* untuk para staf pengajar. Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, jelas Agus Widjojo, dapat diikuti oleh 100 peserta. Program Pemantapan Nilai-Nilai kebangsaan tersebut dapat juga mengambil tema yang lebih fokus seperti kepemimpinan.

Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto Cipto Lelono, S.E. menjelaskan mengenai program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan. Dalam program tersebut, jelas Guntur Irianto, diajarkan mengenai empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Re-

publik Indonesia. Beliau mengatakan bahwa program tersebut diadakan selama tujuh hari. Berbagai metode mengajar seperti ceramah, diskusi, dan diskusi antar kelompok. Selain itu, di akhir program para peserta mengikuti *outbound*.

Tenaga Profesional Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) Dr. I Putu Sastra Wingarta, mengusulkan agar BPK Penabur mempersiapkan dua perwakilan pengajar untuk mengikuti pendidikan reguler di Lemhannas RI. Dua perwakilan yang mengikuti pendidikan reguler tersebut diharapkan nantinya dapat mengajarkan nilai-nilai kebangsaan kepada rekan kerja lainnya. Selain itu, I Putu Sastra juga mengusulkan agar jika nantinya mengikuti Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, BPK Penabur dapat memilih tema yang berfokus pada pengembangan manusia.

Adri kemudian menyatakan bahwa keinginan yayasan serta pengajar di BPK Penabur untuk mengikuti pendidikan di Lemhannas RI sudah ada sejak tahun lalu namun terhambat oleh belum adanya MoU (Nota Kesepahaman) serta waktu pendidikan yang cukup lama. Hal tersebut dikarenakan para staf pengajar ataupun kepala sekolah harus meninggalkan pekerjaan untuk sementara waktu ketika mengikuti pendidikan di Lemhannas.

"Kami memang tertarik untuk melengkapi kurikulum kami dengan pengetahuan nilai-nilai kebangsaan ini dengan harapan mereka (staf pengajar) dapat membawa pengetahuan tersebut ke dalam dunia pendidikan," ujar Ardi Lazuardi. Ardi berharap nilai-nilai kebangsaan dapat menjadi salah satu ekstra ulikuler karena ekstra kulikuler bersifat lintas agama.

Mengenai peran sekolah dan orang tua, Agus Widjono mengatakan bahwa dengan perkembangan masyarakat pada saat ini dinilai membebani orang tua sehingga menuntut orang tua untuk lebih berfokus dalam bekerja dan menitipkan anak-anak mereka ke sekolah dengan *full day school* atau sekolah yang berlangsung hingga sore hari. Hal tersebut dinilai Agus Widjono dapat meningkatkan resiko proses belajar mengajar yang disusupi dengan aneka ragam konten substansi atau ideologi asing.

Adri juga mengatakan bahwa fenomena tersebut menjadi salah satu fokus BPK Penabur. Kurikulum pendidikan saat ini dirasa Ardi termasuk berat sehingga menuntut para siswa untuk terus belajar dan membatasi ruang gerak dan waktu bermain mereka. "Kami sebagai Pengurus Yayasan BPK Penabur yang baru saja dilantik dan bekerja hingga 4 tahun ke depan juga memikirkan mengenai sistem pendidikan untuk 10 hingga 20 tahun ke depan," jelas Adri Lazuardi.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H., Deputy Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto, Direktur Pengkajian Lemhannas RI Drs. Berlian Helmy, M.Ec., serta beberapa Tenaga Ahli dan Profesional Lemhannas RI.



Kepala Biro Humas Paparkan Pengenalan Lembaga Pada Peserta Negara Sahabat PPRA LIX

Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI, Brgijen TNI Mindarto memaparkan pengenalan lembaga kepada para peserta negara sahabat PPRA LIX di Ruang Gatot Kaca Gedung Astagatra Lt. 3, Lemhannas RI, Jakarta (14/1).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kerjasama Lemhannas RI, Laksma TNI Budi Setiawan, S.T. Di hadapan para peserta, Budi Setiawan memberikan pengarahan sekaligus mengenai mekanisme *pre-course* peserta negara sahabat. Budi juga memberikan gambaran mengenai proses pendidikan yang akan dijalani oleh peserta selama tujuh bulan ke depan. Para peserta dari negara sahabat tersebut berasal dari delapan negara yakni Sri Lanka, Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Singapura, Timor Leste, dan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mindarto menyampaikan materi mengenai sejarah berdirinya Lemhannas RI. "Lemhannas RI berdiri sejak tahun 1960 dilatarbelakangi oleh munculnya eskalasi politik akibat adanya ketidakpastian pertarungan ideologi liberal dan komunisme, baik di dunia maupun Indonesia," kata Mindarto. Atas kondisi tersebut, muncul gagasan sejumlah panglima tinggi di staf keamanan nasional untuk membentuk Lembaga Pertahanan nasional (Lemhannas

RI) yang kemudian pada 20 Mei 1965 diresmikan oleh presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Pendirian tersebut bertepatan dengan momentum hari kebangkitan nasional yang bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan cita-cita proklamasi kemerdekaan sebagaimana yang tertera dalam alinea kedua pembukaan UUD 1945 serta tujuan nasional dalam alinea keempat. Dalam perkembangannya, pada tahun 1994 berdasarkan Keppres Nomor 4/1999 tanggal 1 Februari 1994, Lembaga Pertahanan Nasional mengalami restrukturisasi dan menjadi Lembaga Ketahanan Nasional. Hal tersebut berpengaruh terhadap reposisi Lemhannas RI dari Mabes ABRI ke Departemen Pertahanan dan Keamanan RI. Selanjutnya pada tahun 2001, berdasarkan Keppres Nomor 16/2001 tanggal 23 Januari 2001, Lemhannas RI melakukan restrukturisasi organisasi. "Lemhannas RI melakukan restrukturisasi organisasi sebagai lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang bertanggung jawab langsung ke Presiden RI. Selain

itu, pertama kalinya Lemhannas RI dipimpin oleh pejabat sipil," kata Mindarto. Selain terkait dengan kesejarahan, Mindarto juga menjelaskan mengenai arti lambang, visi dan misi, struktur organisasi sesuai dengan Pergub No. 12 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017, program kerja Lemhannas RI, persyaratan penerimaan peserta PPRA, PPSA, dan P3DA, dan sarana Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas).



Lemhannas RI berdiri sejak tahun 1960 dilatarbelakangi oleh munculnya eskalasi politik akibat adanya ketidakpastian pertarungan ideologi liberal dan komunisme, baik di dunia maupun Indonesia

- Mindarto -



Lemhannas RI Gelar Konsolidasi Tenaga Kependidikan

Dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan program pendidikan di tahun 2019, Lemhannas RI mengadakan Konsolidasi Tenaga Kependidikan di Ruang Pancasila, pada 16 Januari 2019 di Gedung Trigatra Lt. 3, Lemhannas RI. Konsolidasi yang digelar selama dua hari tersebut dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo.

Dalam laporan Deputi Bidang Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI (Purn) Karsiyanto kepada Gubernur Lemhannas RI, disampaikan bahwa tujuan konsolidasi tersebut untuk mensosialisasikan juknis (petunjuk teknis) Kedeputian Pendidikan dan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan PPRA LIX, PPSA XXII, dan P3DA X yang akan diselenggarakan pada tahun 2019.

Dengan tujuan tersebut, diharapkan dapat mencapai sasaran yang dituju yaitu diperoleh kesiapan dari tenaga pengajar, tenaga pengkaji, tenaga profesional, dan pejabat struktural Lemhannas RI terkait dengan pelaksanaan PPRA LIX, PPSA XXII, dan P3DA X.

Karsiyanto juga melaporkan bahwa konsolidasi yang diikuti oleh 120 tenaga kependidikan Lemhannas RI tersebut akan membahas mengenai evaluasi operasional pendidikan 2018, mekanisme pendidikan dan kesiapan pelaksanaan pendidikan tahun 2019, revisi juknis penulisan KKA, KKK, dan Taskap, revisi juknis kerangka acuan dan revisi juknis penilaian peserta.

Sementara itu Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa konsolidasi ini merupakan langkah awal agar program pendidikan dapat mencapai target dan sasaran yang telah direncanakan.

Kegiatan ini dinilai memiliki arti penting dan strategis dalam proses menyiapkan dan memantapkan kader pimpinan tingkat nasional tahun 2019 ini.

Untuk mendukung program pendidikan, seluruh pihak harus bekerja sama meningkatkan kualitas pendidikan dan tidak hanya berfokus pada output yang baik tetapi juga outcome yang baik. Dari hasil evaluasi Program Pendidikan di tahun 2018, terdapat beberapa perbaikan yang harus dilakukan di tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengakhiran. Maka dari itu, lanjut Agus Widjojo, semua pihak yang terkait harus menindaklanjuti secara sungguh-sungguh.

Agus Widjojo mengatakan bahwa agar program pendidikan 2019 yaitu PPRA LIX, PPSA XXII, dan P3DA X dapat terselenggara dengan optimal, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang intens dari seluruh unsur pendukung untuk mempersiapkan 10 komponen pendidikan yaitu kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, tenaga pendukung, alins alongins, bahan ajaran, evaluasi anggaran, sarana prasarana, sistem, dan metodenya.

Konsolidasi ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi para peserta dalam setiap proses penyelenggaraan pendidikan, merevisi juknis penyelenggaraan PPRA, PPSA, dan P3DA. Dengan adanya kesamaan persepsi, Agus Widjojo berharap, program pendidikan dapat berlangsung lebih terarah dan memenuhi semua sasaran.

“Konsolidasi ini bukan hanya rutinitas namun merupakan sarana dan upaya Bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan setiap tahun. Manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya,” jelas Agus Widjojo dalam sambutannya.

Sementara itu, Karsiyanto dalam paparannya mengenai evaluasi program pendidikan 2018 mengatakan terdapat beberapa aspek yang harus dibenahi di dalam pelaksanaan program pendidikan di tahun 2019. Beberapa aspek yang harus dibenahi terdapat di aspek materi pendidikan, aspek operasional pendidikan dan aspek pembina materi/ tenaga pengajar/ tenaga pengkaji/ tenaga profesional/ tutor/ narasumber. Aspek-aspek yang harus dibenahi dihimpun dari masukan para peserta pendidikan.

Selain itu, Karsiyanto juga menjelaskan mengenai persiapan sepuluh komponen pendidikan penting pendidikan. Karsiyanto menyatakan bahwa tenaga pengajar, evaluasi anggaran, sarana prasarana sudah disiapkan. Sementara beberapa komponen lain sedang dalam proses. Tema Seminar untuk para Peserta PPRA LIX juga telah ditentukan.

Konsolidasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai revisi kerangka acuan revisi juknis penulisan KKA, KKK, dan Taskap, revisi juknis kerangka acuan dan revisi juknis penilaian peserta.





Agum Gumelar: Perbedaan itu Biasa dan Wajar

Ikatan Keluarga Alumni (IKAL) Lemhannas RI melakukan pelantikan pengurus IKAL Komisariat Provinsi Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Maluku Utara, dan Lampung pada Rabu, (16/1) bertempat di Gedung Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menyatakan dalam sambutannya, bahwa menjelang dilaksanakannya pesta demokrasi pada 17 April mendatang, perbedaan pilihan adalah hal yang biasa dan wajar. Pengurus IKAL diharapkan dapat menyebarkan semangat kedewasaan demokrasi dengan menghormati aturan, norma, dan itikad dalam berdemokrasi.

Agum Gumelar menyatakan situasi yang terjadi selama Pemilu 2019 harus dapat disikapi secara bijak dan dewasa. "Sebagai pemikir intelektual di IKAL, saya berharap seluruh anggota IKAL mengerti dan memahami kehidupan demokrasi, bahwa perbedaan itu adalah soal biasa dan wajar. Perbedaan itu sementara, karena setelah pilkada atau pilpres selesai, kita harus normal kembali sebagai bang-

sa Indonesia.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI Purn Agus Widjojo yang hadir sebagai undangan dalam acara tersebut menyebutkan bahwa para pengurus IKAL untuk dapat turut menciptakan suasana yang kondusif sekaligus dapat menyukseskan pesta demokrasi pada tahun 2019 ini. Agus menyatakan IKAL yang menjadi bagian dari Lemhannas RI, harus mampu mengkonsolidasikan seluruh anggota IKAL sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan berkiprah untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara dengan berbagai kegiatan.

"Komisariat-komisariat yang telah terbentuk di beberapa wilayah, pada dasarnya akan menambah instrumen ikal pusat dalam mendorong dan meningkatkan kapasitasnya secara nasional. Saya berharap, keberadaan IKAL Komisariat yang terbentuk pada hari ini, juga mampu berperan menjadi katalisator dalam pe-

nyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan di wilayahnya masing-masing," lanjut Agus.

Selain pelantikan pengurus, kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi sekaligus rapat koordinasi (rakor) pengurus IKAL Pusat dengan Komisariat IKAL Provinsi seluruh Indonesia. Rakor ini diselenggarakan berdasarkan amanat AD/ART untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja IKAL selama tahun 2017-2018 dan juga mengevaluasi visi dan misi IKAL.

Pada kegiatan ini, hadir pimpinan Lemhannas RI lainnya yaitu Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdy TNI Bagus Puruhito dan Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H.. Sementara itu, hadir pula Wakil Ketua I IKAL Komjen Pol (Purn) Togar Sianipar dan Wakil Ketua Umum I IKAL Dr. Mustafa Abubakar.

Agus Widjojo :

Jaga Netralitas dalam Menyambut Tahun Politik 2019

Meski kontestasi dan suhu politik semakin meningkat seluruh anggota Lemhannas RI sebagai abdi negara harus menjaga netralitas dari salah satu kandidat dalam pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif,” kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo melalui amanat yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puhito dalam upacara bendera rutin di Lapangan Tengah Lemhannas RI (17/1).

Di hadapan para peserta upacara, ditegaskan pula bahwa Lemhannas RI tidak terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat tertentu. Terkait dengan penyelenggaraan pemilihan presiden dan legislatif, Agus Widjojo mengatakan bahwa saat ini, tahapan pemilu telah memasuki tahap kampanye calon anggota DPR pusat, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten / kota serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

“Lemhannas RI secara tegas tidak terlibat dalam politik praktis yang men-

dukung salah satu kandidat tertentu. Selain itu, kita juga harus mampu bersikap bijak dan cerdas serta antisipatif terhadap potensi-potensi konflik sosial yang berkembang di masyarakat,” himbau Agus Widjojo dalam amanatnya.

Selain itu, dalam amanat tersebut, Agus Widjojo juga menyampaikan beberapa hal terkait kelembagaan seperti capaian realisasi anggaran Lemhannas RI tahun 2018 yang meningkat bila dibandingkan dengan realisasi anggaran di tahun 2017. Terkait dengan program kerja tahun 2019, Agus Widjojo menghimbau seluruh unit kerja di Lemhannas RI untuk mampu mengoptimalkan seluruh fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian hingga pengawasan secara cermat dan tepat.

Untuk terwujudnya kinerja lembaga yang optimal, Agus Widjojo juga menyebutkan agar seluruh unit kerja dapat meningkatkan soliditas dan sinergis antara unit kerja sekaligus menjalin dan membangun jejaring kerja dengan *stakeholders* sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas output maupun *outcome*.

Agus Widjojo juga mengatakan bahwa berdasarkan struktur organisasi Lemhannas RI yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 harus sudah sepenuhnya dapat diterapkan di seluruh unit kerja. “Pemetaan sumber daya manusia yang dimiliki harus sesuai bahkan diperkuat baik dalam aspek kuantitas, kualitas maupun kapabilitasnya secara konsisten dan berkelanjutan,” jelas Agus Widjojo.

Ia berharap tahun 2019 dapat memberikan inspirasi dan semangat baru serta menjadi momentum untuk trus berkarya dan berkinerja dengan lebih baik. Sebelum menutup sambutannya, Agus Widjojo mengingatkan pula mengenai persiapan pemeriksaan BPK RI dan juga Program Pendidikan Reguler Angkatan LIX yang akan dibuka pada 22 Januari 2019. “Persiapkanlah seluruh data dukung pertanggung-jawaban pelaksanaan program kerja dan anggaran tahun anggaran 2018 secara terbuka dan transparan. Saya optimis kita akan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah kita raih selama tiga tahun terakhir,” kata Agus Widjojo.

Lemhannas RI secara tegas tidak terlibat dalam politik praktis yang mendukung salah satu kandidat tertentu. Selain itu, kita juga harus mampu bersikap bijak dan cerdas serta antisipatif terhadap potensi-potensi konflik sosial yang berkembang di masyarakat

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Lemhannas RI Sosialisasikan PPRA Tahun 2020

Lemhannas RI mengadakan sosialisasi Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LX dan LXI tahun 2020 kepada atase pertahanan negara sahabat di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra, Lt.3, Lemhannas RI, Jumat (18/1). Acara sosialisasi tersebut dibuka oleh Kepala Biro Kerja sama Settama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan S.T..

Dalam sesi paparan, Kabag Kerma Luar Negeri Rokema Settama Lemhannas RI Kolonel Lek Rujito D. Asmoro Gdipl In DS., M.A., RCDS. memaparkan mengenai visi dan misi Lemhannas RI. Rujito menjelaskan bahwa visi Lemhannas adalah untuk menjadi Lembaga yang berkualitas, kredibel dan berkelas dunia di bidang ketahanan nasional. Sedangkan misi Lemhannas adalah menyelenggarakan pendidikan untuk kader pimpinan tingkat nasional, melakukan pengkajian strategik untuk masukan kepada pemerintah, dan menyelenggarakan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

Rujito kemudian menjelaskan bahwa PPRA diselenggarakan selama tujuh bulan dan dibagi menjadi dua sistem yaitu *off campus* dan *on campus*. *Off campus* dilaksanakan selama 1,5 bulan. Selama *off campus*, para peserta negara sahabat melakukan proses belajar dengan

teleconference, dan *chatting* secara *live* dengan para pengajar dan peserta pendidikan lain. Sementara itu, sistem *on campus* dilakukan selama lima bulan di Lemhannas RI dengan metode ceramah dan diskusi.

Selama menjalani pendidikan, para peserta negara sahabat juga akan mengikuti program inti dalam pendidikan yaitu Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Penulisan Kertas Karya Perseorangan (Tas-kap), Olah Sistem Manajemen Nasional (Olah Sismennas), dan Penyelenggaraan Seminar Nasional.

Untuk menjadi peserta pendidikan di Lemhannas RI, Rujito menjelaskan bahwa peserta harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu merupakan anggota aktif TNI, Polri, atau Aparatur Sipil Negara, berpangkat Kolonel, Kolonel Senior, Brigadir Jenderal atau berpangkat setara untuk Aparatur Sipil Negara, berusia maksimal 53 tahun, direkomendasikan oleh institusi asal, telah mengikut Seko-

lah Komando dan pendidikan setara bagi Aparatur Sipil Negara, dan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan pemeriksaan lengkap di rumah sakit pemerintah atau militer.

Selain persyaratan umum, para calon peserta dari negara sahabat juga harus memenuhi persyaratan administratif seperti paspor diplomatik, visa, izin keamanan yang dikeluarkan oleh Atase Pertahanan Indonesia yang berada di Kedutaan Besar Indonesia di negara asal calon peserta, serta visa Indonesia 20-1A. Rujito juga menjelaskan mengenai jadwal detail yang harus dihadiri oleh calon peserta sebelum memulai pendidikan. Jadwal tersebut meliputi registrasi dan pengumpulan dokumen yang telah di perlukan serta kursus singkat Bahasa Indonesia serta material inti pendidikan di Lemhannas RI. Sebelum menutup paparannya, Rujito membuka sesi tanya jawab dengan calon peserta dan diakhiri dengan foto bersama.



Lemhannas RI Adakan Sosialisasi Undang-Undang Pemilu

Lemhannas RI menggelar Sosialisasi Undang-Undang Pemilu kepada seluruh jajaran dan personil Lemhannas RI setelah dilaksanakannya apel pagi, berlokasi di Auditorium, Gajah Mada Lemhannas RI, pada Senin pagi (25/2).

Sosialisasi tersebut menghadirkan dua orang narasumber yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu Direktur Kewaspadaan Nasional Dr. Drs. Akbar Ali, AP, M.Si., serta pembicara dari Komisi Pemilihan Umum yaitu Kepala Biro Teknis dan Hupmas Nur Syarifah, S.H., LL.M. Dalam sambutannya, Gubernur Lemhannas RI yang dibacakan oleh Kepala Biro Kerja Sama Laksma TNI Budi Setiawan, mengatakan bahwa dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang akan diselenggarakan pada 17 April 2019 memiliki tantangan tersendiri seperti netralitas aparatur sipil negara, TNI dan POLRI yang menjadi ujian bagi ketangguhan demokrasi di Indonesia.

Selain diuji dengan netralitas, dijelaskan Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Biro Kerja Sama, pemilu juga menghadapi tantangan lain yaitu politik uang, berbagai isu tentang suku, ras, agama, dan antar golongan, berita hoaks, hingga keadaan pasca pemilu. Berbagai fenomena yang melatarbelakangi terjadinya hal tersebut, dijelaskan Gubernur Lemhannas

RI dalam sambutannya, mendorong kita yang peduli dengan perkembangan demokrasi bangsa untuk tidak menyimpang dari Undang-Undang Pemilu.

Akbar Ali dalam paparannya yang berjudul Netralitas dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, mengatakan bahwa pelaksanaan pemilu 2019 ini bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. "Ini adalah tanggung jawab kita semua dalam membantu penyelenggara teknis yaitu, DKPP, KPU, dan Bawaslu," ujar Akbar Ali.

Peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu legislatif dan residen seperti yang diatur dalam UU no 7 tahun 2017 adalah untuk membentuk panitia seleksi yang untuk menyeleksi komisioner KPU dan Bawaslu, membantu KPU dan Bawaslu dalam meneruskan kebijakan-kebijakan mengenai pemilu, mempersiapkan personil untuk penyelenggaraan pemilu di daerah, dan membantu mempersiapkan sarana prasarana pemilu.

Sementara itu, narasumber kedua Nur Syarifah memaparkan bahwa untuk

memperkuat sistem presidensial dan untuk efisiensi anggaran efektivitas mobilitas pemilih, akan ada lima surat suara di pemilu serentak ini. Pemilu 2019 ini, jelas Nur Syarifah, negara menjamin hak pilih seluruh warga negara Indonesia di dalam maupun luar negeri. Saat ini, KPU mengelola dan menyelenggarakan pemilu di 130 perwakilan Indonesia di luar negeri.

Mengenai hak pilih pemilu, Nur Syarifah juga mengatakan bahwa pemilih yang berdomisili di kota yang berbeda dengan yang tertera di daftar pemilih, tetap dapat mengikuti Pemilu legislatif dan presiden tahun 2019 ini dengan mengurusnya ke kantor KPU terdekat di daerah domisili saat ini atau mendatangi tempat pemungutan suara terdekat satu jam sebelum berakhirnya jadwal pemilihan.

"Untuk penduduk yang berdomisili di kota berbeda dengan yang tertera di daftar pemilih, dapat mengurus perpindahan lokasi TPS (tempat pemungutan suara) ke KPU terdekat di daerah domisili saat ini atau datang ke TPS terdekat satu jam sebelum jadwal pemilihan berakhir," ujar Nur Syarifah.





Gubernur Lemhannas RI Terima Kunjungan Alumni Universitas Samratulangi Manado

Rabu (23/1), Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kedatangan Alumni Universitas Samratulangi Manado di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lantai I, Lemhannas RI. Alumni Universitas Samratulangi yang berjumlah enam orang tersebut dipimpin oleh Merry Ervina Rumintjap, M.Si. ini bertujuan untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Lemhannas RI.

Dalam audiensi, Merry mengatakan bahwa alumni Universitas Samratulangi bermaksud untuk mengadakan seminar. Seminar tersebut, ujar Merry, rutin dilaksanakan setiap tahun. tema kepemimpinan yang diangkat sebagai tema seminar di tahun 2019 ini bermaksud menunjukkan bentuk kepedulian alumni terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebangsaan dan kepemimpinan. Seminar ini, jelas Merry, akan di-

hadiri oleh 200 peserta yang merupakan ketua pemimpin alumni universitas samratulangi di berbagai kota. Dalam seminar yang akan digelar pada 3 Februari mendatang tersebut, Merry juga menyampaikan maksudnya untuk mengundang Gubernur Lemhannas RI untuk hadir sebagai *keynote speaker* serta meminta izin untuk menggunakan Gedung Lemhannas RI sebagai tempat pelaksanaan seminar.

Agus Widjojo menanggapi undangan tersebut dengan positif dan menyatakan akan hadir sebagai *keynote speaker*

dalam seminar tersebut. Mengenai tempat pelaksanaan, Agus Widjojo menyampaikan kemungkinan besar seminar dapat dilaksanakan di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Hadir dalam audiensi tersebut mendampingi Gubernur Lemhannas RI adalah Kepala Biro Kerja Sama Lemhannas RI Laksma TNI Budi Setiawan, S.T., Kepala Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI Brigjen TNI Mindarto, dan Kepala Biro Umum Lemhannas RI Brigjen Pol Drs. Triyono Basuki Pujono, M.Si.

Lemhannas RI Buka Pendidikan PPRA LIX Gubernur Tekankan Cara Berpikir Kritis

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo membuka Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LIX, di Gedung Dwiwama Purwa, Lemhannas RI (22/1). Acara diawali dengan laporan dari Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI Karsiyanto, S.E.

Karsiyanto melaporkan bahwa Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LIX diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari 18 orang dari TNI AD, 10 orang dari TNI AL, 8 orang dari TNI AU, 20 orang dari Polri, 20 orang dari Kementerian, 8 orang dari LPNK, 1 orang dari Kopertis, 1 orang dari KADIN Indonesia, 4 orang dari Organisasi Masyarakat, dan 9 orang dari negara sahabat yaitu berasal dari Srilanka, Bangladesh, India, Malaysia, Myanmar, Singapura, Timor Leste dan Australia.

Di hadapan para peserta dan undangan perwakilan dari berbagai instansi, Agus Widjojo menjelaskan bahwa Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) ditempuh dalam tujuh bulan dengan menggunakan dua sistem. "Sistem yang ditempuh yaitu pertama, sistem pendidikan di luar kampus (*e-learning & teleconference*) dan kedua sistem pendidikan di dalam kampus (ceramah dan diskusi). Kegiatan PPRA yang diikuti oleh segenap peserta selama program pendidikan berlangsung di antaranya Kuliah Umum Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Penulisan dan Penyajian Taskap, Program Pilihan, dan Seminar yang mengangkat tema 'Kedaulatan Energi Nasional dalam Pencapaian Daya Saing Kompetitif Perekonomian'," kata Agus Widjojo.

"Dengan menjunjung tinggi etika, moral dan kejujuran diharapkan peserta mampu melakukan transformasi pola pikir, pola tindak dan pola sikap, mental dan perilaku yang berdasarkan wawasan geopolitik dan geostrategik Indonesia yang holistik dan komprehensif," kata Agus Widjojo melanjutkan. Untuk meningkatkan kualitas kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik kepemimpinan para peserta, proses pendidikan akan ditunjang oleh Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) dan Laboratorium Kepemimpinan Nasional (Labpimnas).

Agus Widjojo menekankan agar bahwa peserta diharapkan dapat cepat beradaptasi dengan lingkungan dan kurikulum pendidikan dan menerapkan cara berpikir kritis. "Kami berharap, kurikulum Lemhannas RI dapat disajikan dengan lebih efisien dan efektif selama tujuh bulan kedepan dengan adanya dukungan penyempurnaan sistem penilaian evaluasi belajar. Penilaian akademik dan kertas karya ilmiah perseorangan juga lebih dipertajam dengan berbagai pembekalan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan peserta pengkajian ulang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kurikulum terutama dilakukan dengan mengadopsi pendekatan cara berpikir kritis," kata Agus Widjojo.



“Cara berpikir kritis dilaksanakan dengan mengajak peserta berpikir tentang hakikat sebuah peristiwa agar dapat menarik pelajaran tentang apa latar belakang yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan apa implikasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga bagaimana cara mengatasinya apabila peristiwa tersebut membawa implikasi negatif,” jelas Agus. Menurut Agus Widjojo, proses belajar mengajar saat ini lebih banyak menggunakan metodologi studi kasus dari peristiwa kontemporer yang terjadi di sekitar saat ini. Dengan demikian, pendekatan tersebut memberi makna lebih konkrit dan konstruktif bagi proses belajar mengajar di Lemhannas, dibandingkan dengan pendekatan preskriptif.

Cara berpikir kritis dilaksanakan dengan mengajak peserta berpikir tentang hakikat sebuah peristiwa agar dapat menarik pelajaran tentang apa latar belakang yang menyebabkan peristiwa itu terjadi, dan apa implikasinya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Para peserta PPRA LIX harus memiliki tekad kuat dalam melakukan revolusi mental melalui transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat. Revolusi mental untuk membentuk karakter kepemimpinan yang kuat, tidaklah hanya diberikan dengan mengajarkan sifat-sifat mental yang baik, tetapi juga dengan menunjukkan bukti nyata bahwa para peserta mengikuti dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dipersyaratkan pada kelulusan para peserta. Kesadaran tersebut akan membentuk kepribadian yang berkarakter dan menjadi sumbangan perseorangan peserta terhadap proses revolusi mental secara nasional. Adapun kepemimpinan sejalan dengan revolusi mental diawali dengan membuka cakrawala pada diri sendiri.





Dalam kurun waktu tujuh bulan ke depan, para peserta akan mengikuti program pendidikan reguler dengan berbagai tahapan seperti kesiapan fisik dan mental. Kesiapan tersebut merupakan kebutuhan yang harus diperhatikan oleh seluruh peserta, karena kegiatan pendidikan PPRA akan menyita dan menguras waktu, tenaga, serta pikiran.

Predikat mendidik pemimpin tingkat nasional di lembaga ini berfungsi sebagai pelengkap karena sebenarnya para peserta sudah menjadi pemimpin tingkat nasional. Adapun program pendidikan di Lemhannas berfungsi dalam mempertajam dan meningkatkan kapasitas dan efektivitas kepemimpinan peserta di tingkat strategis, melalui kompetensi memformulasikan kebijakan nasional terkait yang diperlukan secara fungsional dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan.

“Perlu saya ingatkan bahwa tahap pendidikan belum merupakan wilayah mencetak kinerja yang dihasilkan oleh para peserta di lapangan, baik sebelum memasuki dan setelah lulus dari pendidikan ini. Maka dari pada itu keberadaan para peserta dalam mengikuti pendidikan ini adalah memberi penyegaran dan investasi untuk memperkaya kapasitas saat mereka kembali berkarya di lapangan, oleh karenanya penting bagi para peserta untuk memanfaatkan kesempatan belajar bagi kepentingan para peserta dengan sebaik-baiknya,” ujar Agus.

Agus melanjutkan bahwa para peserta harus mempunyai rencana secara perseorangan apa sebenarnya yang hendak dicapai dalam mengikuti program pendidikan ini. Karena hasil yang dicapai dalam mengikuti PPRA adalah peserta lebih lengkap dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam membuat analisis dan keputusan pada tingkat strategis sebagai seorang pemimpin. Para peserta juga harus bisa memberi nilai tambah bagi diri sendiri pada saat selesai mengikuti pendidikan nanti, dibanding dengan ketika para peserta sebelum mengikuti pendidikan. Proses belajar mengajar di Lemhannas ini bukan untuk bersaing sesama rekan mitra peserta, tetapi setiap individu peserta diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri dan membuktikan bahwa ketika para peserta selesai mengikuti pro-



ses belajar mengajar para peserta telah menjadi individu yang berbeda dengan pengetahuan ketrampilan analisis dan wawasan kebangsaan yang lebih berkualitas. Lemhannas RI tidak mengajarkan lomba kepandaian antar peserta, kepandaian hanya memiliki kualitas dan nilai manfaat bukan di cerminkan oleh nilai yang didapat di sekolah tetapi ditentukan oleh nilai manfaat dan efektivitas kegunaan ketika bertugas di lapangan.

Peserta PPRA diharapkan dapat memahami seluruh ketentuan pedoman maupun teknis terkait berbagai aspek penyelenggara PPRA LIX dengan menjunjung tinggi etika, moralitas, martabat dan kejujuran. Hal tersebut merupakan prasyarat utama karakter peserta dalam berinteraksi dengan para tenaga mengajar.

Gubernur mengucapkan selamat datang kepada para peserta dari negara sahabat, Australia, Banglades, India, Malaysia, Myanmar, Singapura, Sri Langka dan Timor Leste khususnya kepada para peserta yang baru pertama kali berkunjung ke Indonesia keikutsertaan para peserta dari negara sahabat dalam PPRA 58. Diharapkan para peserta tidak hanya mengikuti program pendidikan di Lemhannas tapi juga berkenalan dengan budaya masyarakat serta alam Indonesia dengan segala karakteristiknya. Semoga perkenalan dapat mendapat membari nilai tambah bagi hubungan antara negara asal peserta dengan Indonesia.

Bagi seluruh peserta Gubernur mengatakan bahwa para peserta akan mengalami tujuh bulan yang paling menyenangkan di tengah rekan-rekan sesama peserta dalam lingkungan menggali ilmu pengetahuan dan membangun pengalaman. Acara pembukaan PPRA LIX Lemhannas RI diakhiri dengan ucapan selamat dan ramah tamah. (Humas Lemhannas RI).



dok.humas/lri

Lemhannas RI Tandatangani Memorandum Saling Pengertian dengan NIPSS Nigeria

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menerima kedatangan delegasi *National Institute for Policy and Strategic Studies (NIPSS)* Nigeria yang dipimpin oleh Direktur Jenderal NIPSS Nigeria Mr. Jonathan Mela Juma, mni, di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas Ri, Kamis (24/1). Kunjungan yang diawali dengan Audiensi dengan Gubernur tersebut bertujuan untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Lemhannas RI dan NIPSS Nigeria.

Dalam acara Penandatanganan Memorandum Saling Pengertian, Mr. Jonathan Mela Juma mengatakan bahwa dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian ini diharapkan NIPSS Nigeria dan Lemhannas RI dapat berkembang bersama dan belajar dari pengalaman masing-masing institusi.

Mr. Jonathan Mela Juma kemudian mengatakan bahwa Nigeria dan Indonesia memiliki cukup banyak kesamaan bentuk tantangan yang dihadapi sehingga dengan kerja sama ini, diharapkan pula Nigeria dan Indonesia dapat menemukan solusi bagi tantangan di kedua negara. "Saya berharap Memorandum Saling Pengertian ini dapat menjadi dasar yang solid sehingga diplomasi antar individu dapat terlaksana," ujar Mr. Jonathan Mela Juma.

Mr. Jonathan Mela Juma juga berharap akan semakin banyak warga Nigeria yang ke Indonesia dan sebaliknya. Beliau mengatakan bahwa banyak perusahaan

Indonesia di Nigeria yang turut membantu perkembangan perekonomian di Nigeria.

Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa penandatanganan Memorandum Saling Pengertian ini merupakan bentuk komitmen Lemhannas RI untuk membangun kerja sama dengan NIPSS Nigeria. Penandatanganan tersebut juga merupakan sebuah upaya untuk memperkuat hubungan bilateral antar dua negara yang meliputi bidang-bidang yang terkait dengan tugas dan fungsi dari kedua institusi.

Mengenai hubungan kerja sama Indonesia dan Nigeria, Agus Widjojo mengatakan bahwa kerja sama antara kedua negara telah terjalin sejak tahun 1965. Indonesia kemudian membangun Kedutaan Besar Indonesia di Lagos yang kemudian dipindahkan ke Abuja, Nigeria di tahun 2008. Nigeria, lanjut Agus Widjojo, juga telah membangun kedutaan besarnya di Indonesia sejak 1976.

"Kerja sama antar kedua negara terjalin sangat baik dan terus berkembang. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa kedua negara memiliki posisi yang hampir

sama dalam berbagai area. Kedua negara sama-sama bergabung pada gerakan non-blok, anggota Organisasi kerja Sama Islam, anggota di G77, G15, dan D8," jelas Agus Widjojo.

Agus Widjojo kemudian mengatakan bahwa kerja sama antara Lemhannas RI dengan NIPSS Nigeria berfokus pada memperbaiki kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, menciptakan kajian strategis untuk isu-isu global, pertukaran staf ahli, seminar bersama, dan bidang-bidang lain yang terkait dengan kedua Institusi.

Hadir dalam acara tersebut yaitu dihadiri oleh Konselor Kementerian Luar Negeri Nigeria Mrs. Beatrice N. Archibong, staf NIPSS Nigeria Prof. Kyauta Bulus Tanyigna, Mrs. Abimbola S. Raji, para Pejabat Struktural Lemhannas RI, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, dan Tenaga Pengajar Lemhannas RI. Acara tersebut kemudian ditutup dengan ramah tamah dan kunjungan beberapa fasilitas penunjang pendidikan di Lemhannas RI.

Konsil Kedokteran Indonesia Kunjungi Lemhannas RI

Perwakilan Konsil Kedokteran Indonesia yang dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Bambang Supriyanto, Sp. A (K) melakukan kunjungan ke Lemhannas RI untuk melakukan audiensi dan disambut oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo di Ruang Tamu Gubernur, Gedung Trigatra, Lemhannas RI, Jumat (25/1).

Di awal audiensi tersebut, ketua rombongan yang merupakan Ketua Konsil Dokter Indonesia Prof. Dr. dr. Bambang Supriyanto, Sp. A (K) mengatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan registrasi serta pembinaan terhadap dokter dan dokter gigi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Bambang kemudian mengungkapkan bahwa sebagai dokter, mereka ditempatkan di seluruh Indonesia karena keberadaan dokter sangat dibutuhkan terutama di pelosok tanah air. Untuk mempersiapkan para dokter dikirim ke berbagai daerah di Indonesia tersebut, para dokter hendaknya memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu, Konsil

Kedokteran Indonesia berharap dokter di Indonesia mendapat kesempatan untuk memperdalam pengetahuan mengenai nilai-nilai kebangsaan di Lemhannas RI.

“Saya berharap para dokter bisa mendapatkan bekal mengenai nasionalisme sebelum ditugaskan di daerah-daerah di seluruh Indonesia,” terang Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia sudah pernah mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti kegiatan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI sebanyak dua angkatan. Maka dari itu, Bambang berharap program tersebut dapat diikuti kembali oleh perwakilan dokter dan dokter gigi yang tergabung di Konsil Kedokteran Indonesia.

Agus Widjojo menanggapi positif usulan tersebut. Agus Widjojo kemudian menjelaskan bahwa banyak organisasi yang menandatangani Memorandum Saling

Pengertian untuk secara rutin mengikuti kegiatan Pemantapan tersebut. Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan tersebut, Jelas Agus Widjojo, dapat diikuti maksimal 100 peserta dalam satu *batch* agar dapat dilaksanakan dengan efektif.

Audiensi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan yang mendalam mengenai program Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan.



Saya berharap para dokter bisa mendapatkan bekal mengenai nasionalisme sebelum ditugaskan di daerah-daerah di seluruh Indonesia

Prof. Dr. dr. Bambang Supriyanto, Sp. A (K)
Ketua Konsil Dokter Indonesia




 SERAH TERIMA JABATAN
 WAKIL KETUA PERISTA LEMHANNAS RI
 DARI NY. RINA BAGUS PURUHITO KE LISA WIEKO SYOFYAN
 Jakarta, 21 Februari 2019



Serah Terima Jabatan Wakil Ketua Perista Lemhannas RI

Persatuan Istri Anggota (Perista) Lemhannas RI menyelenggarakan Acara Serah Terima Jabatan Wakil Ketua Perista pada hari Kamis, 21 Februari 2019 di Ruang Konstitusi, Gedung Tri Gatra, Lemhannas RI.

A cara ini merupakan acara serah terima jabatan oleh Wakil Ketua Perista dari Ibu Meirina Bagus Puruhito kepada Ibu Liesa Wieko Syofyan.

Ibu Liesa Wieko Syofyan menjadi Wakil Ketua Perista mengikuti penugasan Marsdya TNI Wieko Syofyan menjadi Wakil Gubernur Lemhannas RI. Sementara itu, Ibu Meirina Bagus Puruhito akan berpindah tugas mengikuti Wakil Gubernur Lemhannas RI sebelumnya, Marsdya TNI Bagus Puruhito yang telah dilantik menjadi Kepala BNPP.

Dalam sambutannya, Meirina Bagus Puruhito selaku menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada ketua Perista Lemhannas RI, Ibu Ninik Agus Widjojo beserta jajaran pengurus Perista lainnya atas peran dan kontribusi di dalam Perista. "Saya menyampaikan terima kasih karena dengan selama ini telah

rut memberikan peran dan kontribusinya dalam membina dan mensejahterakan keluarga besar Lemhannas RI," ujar Ibu Meirina dalam sambutannya.

Ibu Meirina juga mengatakan rasa permintaan maaf atas kekurangan selama menjabat menjadi wakil Ketua Perista. "Atas nama pribadi dan keluarga, memohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan saya," Ujar Ibu Meirina.

Selain itu, Ibu Meirina juga berpesan agar seluruh anggota Perista dapat terus meningkatkan kerjasama diantara pengurus, dan antara pengurus dengan jajaran lembaga, senantiasa terus dibina dan ditingkatkan. Beliau juga mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada Wakil Ketua Perista yang baru, Ibu Liesa Wieko Syofyan.

Dalam kesempatan tersebut, Ibu Liesa Wieko Sofyan selaku Wakil Ketua Perista yang baru saja dilantik menyampaikan rasa syukur atas bergabungnya beliau menjadi bagian dari Perista dan keluarga besar Lemhannas RI. Beliau berharap bersama dengan Perista dapat bersama-sama memberikan pengabdian

kepada masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan peran dan kapasitas yang beliau miliki.

Selain ini beliau juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Perista Lemhannas RI, Ibu Niniek Agus Widjojo beserta jajarannya atas sambutan yang hangat. Sebagai Wakil Ketua Perista yang baru ibu Liesa juga akan terus belajar dan menyesuaikan diri dengan Perista. "Tentu harus banyak belajar dan menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada," ujar Liesa Wieko.





Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama/pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti. Ketahanan keluarga sekaligus menjadi pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai, dan religius

- Yohana Yembise -

Peringatan Hari Ibu: *He for She*, Kemitraan Perempuan dan Laki-Laki

Kampanye *He for She* masih menjadi tema peringatan Hari Ibu 22 Desember 2018, meskipun telah diluncurkan sejak tahun 2015 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). “Bersama Meningkatkan Peran Perempuan dan Laki-Laki dalam Membangun Ketahanan Keluarga untuk Kesejahteraan Bangsa” adalah tema yang dipilih dalam peringatan Hari Ibu tahun ini, untuk menegaskan kembali bahwa perempuan dan laki-laki adalah mitra sekaligus insani yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional. *He for She* sendiri adalah gerakan yang dicetuskan *UN Women* pada September 2014.

Bertempat di Lapangan Tengah, Lemhannas RI melaksanakan kegiatan Upacara Peringatan Hari Ibu, Kamis (27/12). Dalam pidato Menteri PPPA yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito dinyatakan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ketahanan keluarga. “Peran keluarga menjadi salah satu yang diharapkan dapat menjadi bagian utama/pilar untuk mencegah terjadinya kekerasan melalui penanaman nilai-nilai, karakter, dan budi pekerti. Ketahanan keluarga sekaligus menjadi pondasi dalam menerapkan kehidupan yang harmonis, damai, dan religius,” jelas Menteri PPPA.

“Pelibatan semua unsur masyarakat dan multi *stakeholder* sangat diperlukan, termasuk peran laki-laki dalam kampanye-kampanye/gerakan yang mendukung pencegahan kekerasan, dan pencapaian kesetaraan gender”, imbuh Menteri PPPA. Dalam momentum peringatan Hari Ibu ini, Menteri PPPA mengajak masyarakat, terutama generasi muda untuk mengingat tentang hakikat peringatan hari ibu. “Setiap tahunnya adalah Peringatan Hari Ibu merupakan momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan serta gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia”, ungkapnya.





dok.humas/lri

Workshop Usulan Keluaran Baru (*Output*)/ Komponen Baru Lemhannas RI Tahun Anggaran 2020

Kepala Biro Perencanaan Settima Lemhannas RI, Marsekal Pertama TNI Antonius Sri Munada, S.E., M.M., membuka Workshop Usulan Keluaran Baru Perencanaan Tahun Anggaran 2020 di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI (28/1).

Di hadapan seluruh pegawai Lemhannas RI usai apel pagi, Antonius menyampaikan beberapa hal yang penting terkait perencanaan anggaran Lemhannas RI tahun anggaran 2020. Workshop tersebut menurut Antonius penting bagi segenap pegawai Lemhannas RI sebagai bagian dari pengelolaan APBN Lemhannas RI tahun anggaran 2020.

“Kegiatan ini dimaksudkan agar seluruh personel Lemhannas RI secara umum mendapatkan informasi berkaitan dengan perencanaan anggaran secara umum dan unit kerja mampu membuat usulan keluaran baru sehingga kualitas perencanaan anggaran Lemhannas RI menjadi lebih baik akan diberikan asistensi secara khusus kepada personel perencana nantinya,” kata Antonius megawali workshop.

Selanjutnya, Antonius menyebutkan, semua perencanaan akan diawali

dengan visi yang diinginkan. “Untuk itu, kita perlu ketahui bersama bahwa visi Indonesia sampai dengan tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Sedangkan untuk visi Lemhannas RI adalah ‘Menjadi Lembaga yang Berkualitas, Kredibel dan Berkelas Dunia dalam Bidang Ketahanan Nasional’,” kata Antonius.

Penyusunan perencanaan anggaran kementerian lembaga didasarkan dari data masa lalu, kondisi saat ini dan prediksi masa depan serta kebijakan pimpinan. Untuk itu, dibutuhkan peran serta seluruh personel dalam perbaikan dan peningkatan kinerja yang terus-menerus. Antonius menambahkan bahwa keberhasilan perencanaan diukur bukan dari seberapa besar anggaran yang diperoleh dari pemerintah, namun diukur dari seberapa patuh kepada aturan-aturan perencanaan anggaran dan sejauh mana perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan keluaran yang jelas, *outcome* dan *impact* yang terukur. “Pada ujungnya dapat die-

valuasi oleh BPK dengan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian, nilai ‘a’ untuk capaian akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga kita akan mendapatkan remunerasi 90-100% sebagaimana yang telah dijanjikan presiden,” kata Antonius.

Terkait hal tersebut, Antonius menyebutkan upaya dan peran yang dapat dilakukan oleh segenap pegawai Lemhannas RI antara lain yaitu taat terhadap aturan dan ketentuan yang berlaku, menepati jadwal yang telah ditentukan, capaian target sesuai yang direncanakan, adanya ide keluaran baru yang berdampak nasional serta profesional di bidang tugas masing masing dan terus menerus menyesuaikan dengan tuntutan kekinian.

Pada kesempatan tersebut, Antonius memberikan target capaian kinerja Program Ketahanan Nasional Lemhannas RI Tahun Anggaran 2019-2020, yaitu:

Pertama, Kedeputian Pendidikan Tingkat Nasional pada tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan jumlah



keluaran adalah 230 orang dengan rincian kegiatan PPRA LIX 100 orang, PPSA 80 orang, dan P3DA 50 orang sedangkan rencana tahun 2020 mengajukan usulan kegiatan jumlah keluaran 250 orang dengan rincian kegiatan PPRA LX, PPRA LXI 100 orang, dan P3DA 50 orang. Adapun untuk kegiatan LIUN jumlah keluaran tahun 2019 maupun 2020 tetap 20 orang.

Kedua, Kedepuitan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan pada tahun 2019 akan melaksanakan kegiatan-kegiatan jumlah keluaran 600 orang yang akan dilaksanakan melalui tiga kegiatan yaitu Taplai, TOT, dan dialog wawasan kebangsaan sedangkan pada tahun 2020 mengajukan kegiatan Taplai, TOT dan dialog wawasan kebangsaan dengan jumlah keluaran 5700 orang.

Ketiga, Kedepuitan Pengkajian Strategik pada tahun 2019 akan melaksanakan kajian dengan jumlah keluaran 39

naskah kajian sedangkan pada tahun 2020 mengajukan usulan kegiatan dengan jumlah keluaran kajian 59 naskah kajian.

Di akhir paparan, Antonius menyampaikan harapannya kepada segenap pegawai Lemhannas RI untuk terlibat secara aktif dalam sangat menentukan demi keberhasilan penyusunan maupun pelaksanaan program dan kegiatan Lemhannas RI. "Semua lini dari unsur pimpinan sampai dengan staf agar selalu bahu-membahu bekerjasama untuk meningkatkan kinerja Lemhannas RI. Cara meningkatkan kinerja Lemhannas RI dimulai dari diri sendiri, mulai saat ini dengan menanamkan dalam pikiran dan hati kita sebuah pertanyaan yang harus kita jawab bersama yaitu 'Apa yang dapat diberikan kita setiap harinya pada Lemhannas RI untuk meningkatkan kinerja'," kata Antonius.



Keberhasilan perencanaan diukur bukan dari seberapa besar anggaran yang diperoleh dari pemerintah, namun diukur dari seberapa patuh kepada aturan-aturan perencanaan anggaran dan sejauh mana perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan keluaran yang jelas, outcome dan impact yang terukur.

Marsekal Pertama TNI
Antonius Sri Munada, S.E., M.M.,



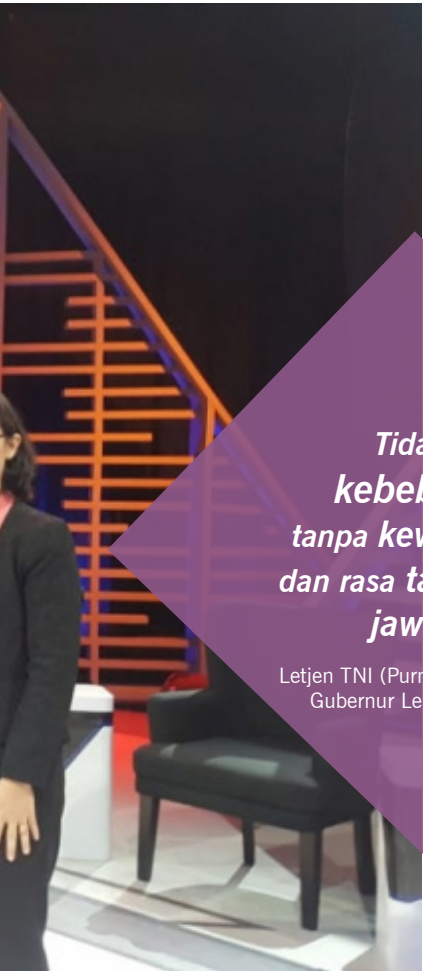
Agus Widjojo Reformasi Upaya Membangun Sistem Politik

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi pembicara di acara Satu Meja Kompas TV pada Rabu (30/1).

A cara tersebut turut dihadiri oleh Mochtar Pabottingi, Dr. Dina Wisnu, dan Sudiman Said. Dalam kesempatan tersebut, Agus Widjojo melihat bahwa fenomena reformasi di Indonesia mengakibatkan pada penekanan demokrasi untuk melahirkan sistem politik yang bebas. “Reformasi itu adalah sebuah upaya dalam membangun sistem politik yang demokratis, atau lebih demokratis apabila kita memang sebetulnya dari sejak awal mencoba untuk membangun sistem politik yang demokratis,” kata Agus Widjojo.

Menurutnya, demokrasi ditekankan dengan segala kebebasan yang ada, namun proses demokratisasi itu tidak lepas tanpa nilai dan hadir dalam isolasi. Demokrasi tetap terikat pada dua elemen, pertama jika membahas mengenai kebebasan, maka sebetulnya bergerak meninggalkan sebuah sistem yang terpusat ataupun otoritarian, tetapi hal tersebut mengekang kebebasan.

“Namun, pada saat ingin beralih kepada kebebasan. Kebebasan saja tidak cukup karena bisa bercabang jika tidak tidak diikat oleh elemen yang penting. Cabang tersebut yang dimaksud adalah kebebasan yang menjerus kepada anarki.



**Tidak ada
kebebasan
tanpa kewajiban
dan rasa tanggung
jawab**

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Hal tersebut akan terjadi jika tidak diskur dengan tanggung jawab,” kata Agus Widjojo.

“Tidak ada kebebasan tanpa kewajiban dan rasa tanggung jawab karena untuk mengadopsi dan mencoba mengejar kebebasan tersebut akan terlihat lebih mudah tetapi tanggung jawab jadi terlupakan,” kata Agus menambahkan. Selanjutnya, ia menyebutkan bahwa fakta dalam kebebasan terkandung tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang berdampingan dan tak terpisahkan. Menurutnya, hal itu tak lepas dari budaya tradisional kita yaitu tanggung jawab perseorangan tidak merupakan ciri yang kuat di dalam sistem kultur tradisional.

“Sejak kecil anak-anak diajarkan satu sumber kebenaran dalam keluarga yaitu orang tua. Jika ada permasalahan di dalam keluarga maka diputuskan oleh kepala keluarga dan anak-anak akan mematuhi. Di dalam pendidikan maka sumber kebenaran di sekolah adalah guru,” kata Agus Widjojo. Menurutnya, fenomena tersebut melahirkan budaya yang tumbuh di masyarakat yaitu sumber kebenaran yaitu bos. Dari sinilah asal

mulanya asal bapak senang (ABS) yang cukup kuat melekat di dalam masyarakat kita. Pada kultur tradisional pemberian kebebasan yang bertanggung jawab untuk berpikir sendiri, memutuskan sendiri apa yang seseorang pikir contohnya di dalam keluarga, orang tua yang mempertimbangkan apa yang terbaik bagi si anak.

Melihat fenomena desain pemilu serentak 2019 dalam memilih presiden, DPR baik di tingkat nasional, provinsi, daerah, dan DPD, masyarakat dan para politisi lebih terfokus pada pemilihan presiden. Menurut Agus Widjojo, hal tersebut disebabkan masyarakat lebih terobsesi pada pemilihan pemimpin atau presiden. “Masyarakat kita tidak bisa hidup tanpa pemimpin. Jika tidak ada pemimpin maka akan mencari pemimpin karena pemimpin itu yang menentukan nasib kita tetapi pemimpin juga jika terjadi kekecewaan akan ada yang dipersalahkan,” kata Agus Widjojo.

“Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat kesultanan, dalam pendidikan kita bisa disebutkan bahwa kita belum bertitik berat untuk membangun kemandirian individual. Hal tersebut terus berkembang ditambah dengan fenomena partai politik yang tidak efektif dalam melaksanakan fungsinya maka masyarakat mulai kehilangan kepercayaan pada partai politik,” kata Agus Widjojo melanjutkan. Menurut Agus, pendidikan politik bagi masyarakat merupakan tanggung jawab partai politik. “Adapun tanggung jawab partai politik seperti mengadakan rekrutmen yang baik dan pembinaan kader, sehingga munculnya pada saat pemilu partai politik itu bisa memunculkan alternatif pemimpin yang memang berkualitas di hadapan rakyat,” kata Agus Widjojo.

Pada kesempatan yang bersamaan, Budayawan Indonesia, Mochtar Pabottinggi, memberikan pandangannya mengenai liberalisme yang mulai mendominasi budaya Indonesia. “Pandangan yang menyatakan bahwa politik Indonesia liberal bahkan sangat liberal adalah pandangan yang kurang begitu pas. Kebenarannya adalah bahwa Indonesia memasuki era reformasi dalam kondisi yang keruh. Keruh dalam arti semua kesalahan-kesalahan orde baru belum dikoreksi sebelumnya. Kerusakannya adalah politik dan hukum tidak sebagaimana

mestinya,” kata Mochtar Pabottinggi.

Menurut Pabottinggi, kerusakan bukan hanya pada sistem melainkan juga manusia rusaknya. “Mereka rusak disebabkan oleh ketiadaan patokan benar dan salahnya. Bukan juga panutannya yang tidak benar, melainkan hal yang benar tidak lagi dibenarkan dan begitu pun sebaliknya konsekuensinya adalah hukum tidak lagi berdiri tegak,” kata Pabottinggi. Dr. Dina Wisnu, Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) menyebutkan bahwa politik Indonesia saat ini adalah politik yang mengulik emosi seperti miskinnya dialog tentang substansi dalam diskusi. “Dua puluh dua tahun sejak reformasi digulirkan dan sebelumnya bangsa ini ingin keluar dari DPR sebagai *ragustamp* tukang stempel program pemerintah,” kata Dina.

Namun Dina berpendapat, masyarakat berharap betul bahwa akhirnya muncul legislasi yang berpihak pada masyarakat dan bisa mengimbangi ide-ide yang dilontarkan oleh pemerintah. Dari tahun ke tahun kita sudah ubah sistem pemilu, berelasi dengan partai, namun tetap saja ada ambang *threshold* ambang batas suara tidak ada yang berubah. “Hal-hal yang sifatnya dialog dalam demokrasi yang diharapkan memang partisipatif itu dianggap terlalu mahal oleh para politisi kita sehingga mereka masuknya hanya sampai di tataran medsos yang emosional. Hingga detik ini terhitung beberapa bulan menuju pemilu, belum ada yang tahu persis siapa caleg yang akan *running* di dapilnya. Pemilu menjadi hal yang sedemikian demokratis tercipta supaya diharapkan dapat *opened proposional system* dan tidak terjadi lagi oligarki partai,” kata Dina.

Sementara itu, Sudirman Said, menyebutkan bahwa sistem politik yang sangat buruk juga memberi ruang bagi orang-orang baik seperti orang moralis dan idealis untuk bereaksi, karena mereka tidak mungkin membiarkan negara ini sampai turun sedemikian rupa. “Sekarang ini adalah momen baik untuk mengajak orang-orang baik untuk masuk politik karena politik terlalu penting untuk dibiarkan gagal. Kalau ujungnya adalah tujuan masyarakat yang mengendalikannya atau memberi warna ekonomi adalah para pengusaha, perusahaan-perusahaan swasta, maupun negara, APBN maka akan di hulunya akan ada kebijakan-kebijakan,” kata Sudirman Said.

Gubernur Lemhannas: Perlunya Sistem yang Menumbuhkan Kader Pemimpin

“Pengkaderan pemimpin dalam perpolitikan nasional tidaklah cukup tanpa adanya sistem yang memfasilitasi untuk para kader ini menjalani *trial and error*,” kata Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Seminar “Mencari Pemimpin yang Bersih dan Berkhidmat untuk Indonesia”, Sabtu, (2/2) di Auditorium Gajah Mada, Lemhannas RI.

Agus Widjojo yang didapuk menjadi pembicara kunci menyatakan bahwa terlalu beresiko bila pemimpin dibiarkan untuk tumbuh sendiri, inilah tugas penting partai politik sekarang ini.

Partai politik yang berfungsi secara efektif perlu menjalankan proses mencari pemimpin diawali dengan rekrutmen untuk membedakan mereka yang menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang akan dimasukkan ke dalam proses penyiapan pemimpin. “Partai juga menjadi proses akselerasi kader pemimpin yang menunjukkan bakat, dengan memberi prioritas percepatan pembekalan pengetahuan pengalaman, pengembangan diri, tantangan yang semakin besar serta promosi tanggung jawab. Seluruh proses ini

tentu dipagari dengan sistem *rewards and punishment*”, jelas Agus.

Agus menambahkan apabila partai politik berfungsi efektif dalam hal ini, maka pemilih akan disodori alternatif calon yang bersih, kompeten dan berkualitas. Seleksi pemimpin dalam demokrasi adalah pemilihan pemimpin berdasarkan “*market politik*”.

Selain membahas tentang peranan partai politik dalam mencetak pemimpin nasional yang berkualitas pada seminar yang diselenggarakan oleh Jaringan Alumni Pelayanan (Jala) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Agus Widjojo juga menyatakan bahwa dalam upaya mencari pemimpin yang berkhidmat dan berkompentensi (dan bersih), kita harus turut berperan dalam sistem yang mengadakan seleksi dan pembinaan para kader

pemimpin agar lahir pemimpin-pemimpin sesuai dengan ciri-ciri yang kita kehendaki. “Kita tidak bisa menciptakan pemimpin hanya dengan memberi daftar rumusan ciri-ciri yang kita kehendaki dari seorang pemimpin dan berharap pemimpin akan lahir sendiri,” pungkas Agus.

Partai juga menjadi proses akselerasi kader pemimpin yang menunjukkan bakat, dengan memberi prioritas percepatan pembekalan pengetahuan pengalaman, pengembangan diri, tantangan yang semakin besar serta promosi tanggung jawab

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI





Taklimat Awal

Pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan taklimat awal pada pemeriksaan BPK RI di Lemhannas RI, di Ruang Nusantara Gedung Trigatra Lt.I, Lemhannas RI, Jakarta (7/2).

Dalam kesempatan tersebut, Auditor Utama Keuangan Negara I BPK RI Dr. Heru Krisna Reza, selaku penanggung jawab tim pemeriksa BPK RI dan tim pemeriksa BPK RI akan mulai melakukan pemeriksaan di lingkungan Lemhannas RI terhitung sejak 7 Februari 2019 yang lalu. Sesuai dengan pasal 23 E 4 UUD 1945 BPK RI mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara guna mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

“Guna menjamin kelancaran jalannya pemeriksaan diharapkan kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Lemhannas RI agar membantu sepenuhnya pelaksanaan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa BPK RI,” kata Agus Widjojo. Dalam menjalin kerjasama yang baik melalui penyiapan dokumen dan informasi yang menjadi lingkup pemeriksaan tim BPK RI terkait dengan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan secara lengkap dan tepat, sehingga

tim pemeriksa BPK RI dapat mengambil kesimpulan dan penilaian secara objektif di akhir kegiatan tim BPK RI dapat memberikan opini secara tepat terhadap sejauh mana Lemhannas RI telah mengelola keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Agus menyampaikan bahwa pada tahun 2014 Lemhannas RI mendapatkan penilaian pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2014 oleh BPK RI dengan opini wajar dengan pengecualian atau WDP. Sejak itu, Lemhannas RI terus berupaya memperbaiki kinerjanya sesuai agenda reformasi birokrasi. “Hal ini sudah terlihat hasilnya berdasarkan pemeriksaan BPK RI atas laporan Lemhannas RI mulai tahun 2015 hingga 2017 BPK RI memberikan penilaiannya yang tertinggi tanpa pengecualian atau WTP. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan konsultasi yang baik serta bimbingan secara terus menerus dari BPK RI,” kata Agus.

Agus juga menyampaikan ucapan terima kasih dan serta memberikan peng-

hargaan yang tinggi kepada tim BPK RI yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. “Sangat disadari bahwa dalam pemeriksaan tentu terdapat dinamika antara tim pemeriksa BPK RI dengan unit kerja Lemhannas RI yang menjadi objek pemeriksaan. Sangat diharapkan adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta hubungan yang harmonis antara tim pemeriksa dengan unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan dengan tetap menjaga dan mengedepankan independensi lembaga pemeriksa,” kata Agus Widjojo.

“Selanjutnya dalam setiap klasifikasi atau bahasan materi pemeriksaan dengan unit kerja sebagai obyek pemeriksaan, saya minta agar pimpinan unit kerja menjadikan sebagai prioritas utama untuk menanggapi hasil pemeriksaan dengan bukti-bukti yang sah dan valid, didasarkan kepada kriteria pokok sebagai landasan hukum sehingga mempercepat tindak lanjut penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” Agus mengakhiri sambutannya.

Agus Widjojo Ingatkan Abdi Negara Harus Bersikap Netral dalam Pemilu

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang bertindak sebagai Inspektur Upacara pada Upacara Bendera menghimbau para peserta upacara untuk menjaga kesehatan di saat cuaca telah memasuki bulan penghujan sejak Januari lalu, di Ruang Dwi Warna Purwa, Gedung Pancagatra Lemhannas RI, Senin (18/2).



“**P**eserta upacara yang saya hormati, kita ketahui bersama. Saat ini cuaca di wilayah Indonesia khususnya DKI Jakarta dan sekitarnya telah memasuki musim penghujan sejak bulan Januari yang lalu. Melihat kondisi cuaca tersebut kita perlu mewaspadai dan mengantisipasi berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi di sekitar kita. Oleh karena, itu saya menghimbau kepada seluruh anggota Lemhannas RI, untuk senantiasa mengutamakan kesehatan serta keselamatan diri ketika menghadapi musim penghujan yang berpotensi terjadinya genangan air, banjir bahkan tanah longsor” ujar Agus Widjojo di awal amanatnya.

Upacara bendera yang rutin dilaksanakan setiap bulan kali ini diselenggarakan di dalam ruangan karena cuaca yang tidak mendukung. Upacara bendera yang dilaksanakan di dalam ruangan tersebut tak membuat semangat antusiasme dan rasa nasionalisme para pejabat serta seluruh jajaran Lemhannas RI berkurang.

Selain itu, Agus Widjojo juga menyampaikan perihal program kerja Lemhannas RI dalam bidang pendidikan, pengkajian strategik, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan. “Lemhannas RI dalam program kerja dan anggaran tahun 2019 ini, telah merencanakan berbagai kegiatan program sesuai tugas pokok, fungsi dan peran Lemhannas RI dalam bidang pendidikan. Lemhannas RI pada tahun ini melaksanakan Program Pendidikan Reguler Angkatan ke LIX, yang telah dibuka pada tanggal 22 Januari 2019,” terang Agus Widjojo.

“Selain itu dilaksanakan juga Program Pendidikan Singkat Angkatan XXII

rencananya yang dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019 serta program pemantapan pimpinan daerah angkatan X yang rencananya akan dibuka tanggal 3 September 2019” tambah Agus Widjojo di hadapan para peserta upacara.

Dalam bidang pengkajian strategik, Agus Widjojo mengatakan bahwa Lemhannas RI telah merencanakan pelaksanaan berbagai kajian dari berbagai bidang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil kajian yang bersifat strategis diharapkan dapat disampaikan kepada presiden sebagai bentuk masukan dalam pengambilan kebijakan. Terlebih, dalam bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan, Agus Widjojo mengatakan bahwa telah dilaksanakan konsolidasi sehingga diharapkan program pemantapan nilai-nilai kebangsaan dapat berjalan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Melihat perkembangan suhu politik belakangan ini, Agus Widjojo RI juga mengingatkan kepada seluruh abdi negara baik yang berasal dari TNI, POLRI maupun aparatur sipil negara agar mampu bersikap netral di tengah kalangan masyarakat “Sebelum mengakhiri amanat ini, saya mengingatkan bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan anggota legislatif DPR RI, DPD RI dan DPRD tahun 2019 semakin dekat. Dengan semakin meningkatnya suhu politik yang berkembang di masyarakat, saya mengingatkan kembali bahwa sebagai abdi negara baik berasal dari TNI, POLRI maupun aparatur sipil negara mampu bersikap netral, di tengah masyarakat meskipun seorang aparatur sipil negara memiliki hak politik dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara nanti,” pungkas Agus Widjojo.

Lemhannas RI Selenggarakan Peningkatan Kapasitas Strategi Pengajaran Karakter Bangsa

Lemhannas RI menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Strategi Pengajaran Karakter Bangsa Bagi Tenaga Pengajar, Tenaga Pengkaji, Tenaga Profesional dan Pejabat di lingkungan Lemhannas RI, Senin (18/2) di Ruang Konstitusi, Gedung Tri Gatra, Lemhannas RI.



Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI Guntur Irianto Ciptolono menyatakan dalam laporannya bahwa tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang edukatif, cerdas, dan konstruktif dalam rangka membina dan membangun kembali dasar kebangsaan seluruh elemen bangsa. Kegiatan ini diikuti oleh 60 peserta yang terdiri dari Tenaga Ahli Pengajar, Tenaga Ahli Pengkaji, Tenaga Profesional, dan serta Pejabat Eselon II dan III yang berada di lingkungan Lemhannas RI.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan pembekalan untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik di era pendidikan yang semakin terbuka dan membutuhkan model pemantapan nilai nilai kebangsaan yang inovatif, cerdas, dan konstruktif untuk membangun kembali rasa kebangsaan seluruh elemen bangsa.

Agus Widjojo juga menyatakan bahwa tenaga pendidik merupakan faktor penting dan potensi yang besar dalam menyalurkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam empat konsesus dasar bangsa kepada seluruh komponen

bangsa Indonesia. Oleh karena itu, potensi tersebut diharapkan mampu meningkatkan dan memberikan kontribusi positif dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa saat ini. Agus Widjojo menilai peningkatan kapasitas strategi peningkatan dan karakter bangsa yang dilaksanakan saat ini merupakan langkah yang tepat untuk memelihara dan meningkatkan.

Agus Widjojo berharap setelah mengikuti peningkatan kapasitas strategi pengajaran karakter bangsa tersebut, para peserta diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dalam merancang paparan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru, melaksanakan paparan yang menarik dengan mendayagunakan teknik-teknik komunikasi verbal dan non verbal secara efektif, berperan sebagai motivator nilai-nilai kebangsaan yang persuasif, meningkatkan kepekaan dan daya pikat bagi tenaga pendidik untuk memilih metode-metode pembelajaran yang aktif, dan mampu meningkatkan kemampuan dalam metode-metode pembelajaran yang dipercepat sesuai situasi dan kondisi di kelas.

Agus Widjojo berharap para peserta peningkatan kapasitas dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan antusiasme yang tinggi. “Semoga



Tenaga pendidik merupakan faktor penting dan potensi yang besar dalam menyalurkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam empat konsesus dasar bangsa kepada seluruh komponen bangsa Indonesia

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI**

para peserta dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan semangat dan penuh perhatian” lanjut Agus Widjojo. Kegiatan peningkatan kapasitas ini diselenggarakan selama tiga hari hingga tanggal 21 Februari 2019 mendatang.



Marsdya TNI Wieko Syofyan Gantikan Marsdya TNI Bagus Puruhito sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI

Marsdya TNI Wieko Syofyan dilantik oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo sebagai Wakil Gubernur Lemhannas RI menggantikan Marsdya TNI Bagus Puruhito pada acara Pelantikan dan Serah Terima Jabatan di Ruang Dwi Warna Purwa, Gd. Pancagatra Lt. II, Lemhannas RI pada Selasa (19/2).

Gubernur Lemhannas RI dalam sambutannya mengatakan bahwa proses pelantikan ini merupakan dinamika yang wajar dalam sebuah organisasi sekaligus sarana regenerasi dan penyegaran dalam pembinaan karier personel. Selain itu, pelantikan dan serah terima jabatan ini memiliki makna penting dan strategis sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan tugas.

Berkaitan dengan jabatan Wakil Gubernur, Agus Widjojo mengatakan bahwa Wakil Gubernur bukanlah jabatan yang ringan karena wakil gubernur bertugas membantu Gubernur Lemhannas RI dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Lemhannas RI. Agus Widjojo menambahkan bahwa wakil gubernur tidak hanya diharuskan cakap dalam tugas manajerial, namun juga dituntut untuk

mampu menjadi motor penggerak dalam membangun budaya kerja, serta mampu mensinergikan semua potensi yang dimiliki demi optimalisasi kinerja Lemhannas RI.

“Kita harus mampu membuktikan, kita dapat memberikan hasil maksimal dalam memenuhi peran, tugas pokok dan fungsi Lemhannas RI demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” jelas Agus Widjojo.

Pada kesempatan tersebut, Agus Widjojo juga mengucapkan selamat kepada Wakil Gubernur yang baru saja dilantik Marsdya TNI Wieko Syofyan. “Saya selaku Gubernur mengucapkan selamat kepada kepada Marsdya TNI Wieko Syofyan yang telah mendapatkan kepercayaan untuk memikul tugas dan tanggung jawab jabatan sebagai wakil Gubernur Lemhannas RI,” ucap Agus Widjojo.

Marsdya TNI Wieko Syofyan yang

merupakan mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Udara yang sarat akan pengalaman di berbagai medan tugas diyakini Agus Widjojo mampu segera menyesuaikan diri dengan tuntutan tugas yang baru di Lemhannas RI.

Pada akhir sambutan, Agus Widjojo memberikan ucapan terimakasih kepada Marsdya TNI Bagus Puruhito yang telah memberikan pengabdian luar biasa signifikan kepada Lemhannas RI dalam menata, menggerakkan dan mengontrol jalannya roda organisasi, sehingga semuanya dapat berjalan pada koridor yang benar.

Turut hadir dalam Pelantikan tersebut adalah Sekjen Ikal, Para Deputi, Tenaga Profesional, Tenaga Pengkaji, Tenaga Pengajar, Pengurus Perista, Pejabat Struktural Lemhannas RI serta para tamu undangan. acara tersebut kemudian di teruskan dengan acara pisah sambut dan ramah tamah.



Awali Tahun 2019, Gubernur Lemhannas RI Ajak Seluruh Pegawai Untuk Tingkatkan Kinerja

Dengan dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh jajaran pimpinan dan personel Lemhannas RI. Selain itu, momentum ini dinilai tepat karena bersamaan dengan adanya pergantian pejabat baru di Lemhannas RI yaitu Sekretaris Utama Lemhannas RI dan Wakil Gubernur Lemhannas RI. Jam Pimpinan ini, lanjut Agus Widjojo, juga merupakan tempat untuk mendiseminasi informasi terbaru di lingkungan Lemhannas RI.

Momentum ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi tentang program kerja yang telah dikerjakan oleh Lemhannas RI di tahun 2018 serta program kerja yang mampu dan akan dilaksanakan pada tahun 2019," kata Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Jam Pimpinan Gubernur Lemhannas RI yang dilaksanakan di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI, Rabu (20/2).

"Di tahun 2018, Lemhannas RI telah melakukan Program Pendidikan Reguler, Pelatihan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Dialog Kebangsaan, menghasilkan 36 naskah kajian, dan enam naskah Labkurtannas dan mendapat predikat 'Wajar Tanpa Pengecualian' dari BPK RI atas pemeriksaan pengelolaan anggaran tahun 2017 dan mendapat predikat 'Baik' atau 'B' dari Kementerian PanRB atas hasil evaluasi SAKIP dan implementasi reformasi tahun 2017," kata Agus Widjojo.

Capaian kinerja Anggaran Lemhannas RI di tahun 2018 yang mencapai 99,06 persen serta capaian kinerja kegiatan yang mencapai 100 persen merupakan sebuah pencapaian yang sangat baik bagi Lemhannas RI. Hal tersebut menurut Agus Widjojo dapat tercapai karena kerja sama seluruh unit kerja di Lemhannas RI.

"Hasil ini tidak akan mudah dicapai jika tidak ada kemauan, semangat, dan kerja sama seluruh pihak di Lemhannas RI. Saya berharap hal tersebut dipertahankan di tahun 2019," ujar Agus Widjojo.

Selain itu, Agus Widjojo memaparkan bahwa di tahun 2019 ini, Lemhannas RI akan mengadakan Program Pemantapan Pimpinan Daerah (P3DA) untuk 50 peserta, Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan untuk 200 peserta, Pelatihan untuk Pelatih untuk 200 peserta, dan Dialog Wawasan Kebangsaan untuk 200 peserta untuk mendukung kesuksesan Pemilu dan stabilitas keamanan nasional.

Sementara itu, Lemhannas RI juga mengadakan program yang sejalan dengan komitmen pemerintah yaitu Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPSA) untuk 80 peserta, Program Pendidikan Sing-

kat Angkatan (PPRA) untuk 100 peserta, dan Seminar International (*Jakarta Geopolitical Forum*) sebanyak 1 naskah. Jam Pimpinan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mendetail mengenai penulisan taskap dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.



Hasil ini tidak akan mudah dicapai jika tidak ada kemauan, semangat, dan kerja sama seluruh pihak di Lemhannas RI. Saya berharap hal tersebut dipertahankan di tahun 2019

**Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI**



Lemhannas RI Selenggarakan FGD Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga

Direktorat Pengkajian Sosial Budaya dan Demografi Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI mengangkat *Focus Group Discussion* dengan topik “Revitalisasi Fungsi Utama Keluarga Guna Mewujudkan Ketahanan Nasional” di Ruang Gatotkaca Gedung Astagatra Lantai 3, Lemhannas RI Jakarta (26/2).

Dalam kesempatan tersebut, Lemhannas RI menghadirkan pembicara yaitu: (1) Dr. dr. M. Yani, M.Kes. PKK, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, BKKBN, dengan sub judul : “Konsep-si Kebijakan, Strategi dan Upaya untuk Merevitalisasi Fungsi Utama Keluarga guna Mewujudkan Ketahanan Nasional”, (2) Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. Guru Besar Ilmu Politik dan Ilmu Budaya Dasar, FISIP dan FIB UI (Akademisi) dengan sub judul: “Dampak Globalisasi dan Revolusi Industri Terhadap Tergerusnya Fungsi Utama Keluarga Dalam Pendidikan Moralitas dan Karakter Generasi Muda”, (3) Brigjen Pol. Dr. Nico Afinta, S.I.K, S.H., M.H., Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Ditreskrim Polri, dengan sub judul: “Tingkat Kejahatan *Convensional Crime*, *Organized Crime* dan *Trans National Crime*”, dan (4) Ibu Dini Rahma Bintari, S. Psi, M. Psi., Ph.D, Psikolog., Psikolog UI, dengan sub judul: “Strategi dan Upaya Memperkuat Sistem Keluarga dalam rangka Merevitalisasi Fungsi Utama Keluarga”.

Hadir sebagai penanggap yaitu (1) Ibu Winarti Halim, S.E., M.A., Ketua Yayasan Sahabat Generasi (LSM), (2) Irjen Pol (Purn) Drs. Endro Agung, M.Eng.Sc., Tenaga Profesional Bidang Pertahanan dan Keamanan, Hukum dan Hak Azasi Manusia Lemhannas RI, serta (3) Prof. Dr. Sudaryono, S.U., Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas RI.

Acara yang dimoderatori oleh Brigjen TNI Agus Sulaksono Tenaga Ahli Pengkaji Madya Bidang Ketahanan Nasional Lemhannas RI tersebut, diawali dengan paparan konsep naskah kajian oleh Tim Kerja Kajian oleh Prof. Dr. Sudaryono, S.U., Tenaga Ahli Pengkaji Bwwidang Sosbud Lemhannas RI.

“Dengan mengangkat fungsi keluarga ke dalam kajian strategis Lemhannas RI, menjadi momentum yang tepat untuk menyikapi terjadinya degradasi moral dan karakter yang kini tengah terjadi di masyarakat kita,” kata Agus Sulaksono. Dalam kesempatan tersebut, ia sangat mengharapkan bahwa semakin banyak terbentuk keluarga-keluarga yang saling mencintai sesama, toleransi, maka keluarga dapat membangun budaya gotong



royong serta mempersiapkan anak-anak agar memiliki akhlak yang mulia serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Yani memaparkan mengenai kebijakan dan strategi BKKBN dalam optimalisasi fungsi keluarga untuk mewujudkan ketahanan nasional. Deputi di BKKBN tersebut menyebutkan bahwa dalam konsepsi ketahanan nasional, perlu diperhatikan penduduk dan pembangunan, kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, serta tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan. Dalam meningkatkan kualitas hidup manusia, maka perlu diperhatikan mengenai pembangunan keluarga, pembangunan manusia, serta pembangunan masyarakat.

“Mengapa keluarga penting? Keluarga merupakan pilar-pilar penyangga eksistensi suatu bangsa, apabila pilar-pilar tersebut keropos, maka bangunan suatu bangsa tidak akan mempunyai landasan yang kokoh,” kata Yani. Menurut Yani, lingkungan keluarga adalah faktor pertama dan utama dalam memberi pembinaan tumbuh kembang, menanamkan nilai – nilai moral dan pembentukan kepribadian. “Selain itu, keluarga merupakan tempat belajar bagi anak dalam mengenal dirinya sebagai makhluk sosial dan pembentukan hati nurani, tempat mencontoh dan meneladani sikap serta perilaku yang akan membentuk kepribadiannya, serta keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam beradaptasi dengan lingkungan,” kata Yani melanjutkan.

Masih menurut Yani, masalah keluarga secara nasional yaitu tingginya tingkat kematian ibu dan anak, serta tingginya tingkat kemiskinan, masalah yang

kedua adalah tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga, masalah selanjutnya yaitu rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan serta kesetaraan *gender*, dan terakhir adalah menurunnya keintiman keluarga akibat pengaruh perkembangan zaman.

Pembangunan keluarga di era industri 4.0 juga telah membentuk perilaku keluarga yang baru, yakni yang terkait dengan pola asuh, hak dan kewajiban orang tua/anak, serta pembagian peran dalam rumah tangga. “Era ini membawa perubahan terhadap berkurangnya interaksi langsung antar keluarga, berkurangnya perhatian orangtua terhadap anak, adanya *knowledge gap*, adanya dampak negatif dari gadget dan arus informasi yang didapat oleh anak,” ujar Yani.

Paparan selanjutnya adalah dari Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc. yang mengangkat topik mengenai “Keluarga : *Blind Spot* Kebijakan Pembangunan di Indonesia”. Ia menyebutkan bahwa keluarga tidak mendapat tempat yang sentral dalam wacana dan agenda pembangunan nasional saat ini. Biasa perspektif dalam pembangunan membuat keluarga menjadi tidak tampak dan semakin luput dalam perhatian. Sebagai fondasi kehidupan sosial yang berkelanjutan, keluarga masih terus diharapkan berperan sebagai agen untuk empat hal utama yaitu pengembangan identitas, produktivitas, konsumsi yang bertanggung jawab dan konsolidasi relasi kemasyarakatan.

“*Blind-spot* yang dimaksud adalah situasi dimana pembangunan tidak berhasil menempatkan keluarga dalam arena kebijakan. Dimana keluarga dalam kebijakan pembangunan Indonesia?

Pembatasan jumlah kelahiran penting dengan dominasi program-program *Planned Parenthood*, yang pesat di era tahun 70 dan 80 di berbagai negara negara berkembang,” kata Bambang Shergi. Menurutnya, saat ini Indonesia masih menghadapi bias dalam pemikiran yaitu pertama pembangunan meletakkan individu sebagai fondasi dari perekonomian. Semangat dan nilai dasar pembangunan kita meletakkan individu (*individualism*) sebagai unsur utama dalam proses produktivitas nasional. Ekonomi nasional ditopang dibangun atas dasar kontribusi sektor ekonomi dan selanjutnya diukur dari jumlah penyerapan tenaga kerja. Kedua, keluarga dengan sendirinya tidak menonjol dalam agenda publik. Kedudukannya ada tetapi samar. Keluarga ada dan berperan tetapi tidak dipersoalkan atas keberhasilan individual. Keluarga baru muncul dan dipertanyakan peran dan kedudukannya pada saat kejadian ekstrim pada kasus kriminalitas. Selanjutnya, yaitu dari segi belanja negara, anggaran yang disediakan untuk Keluarga mengalami penurunan. Kecenderungan turunya pembelanjaan negara sedikit banyak menunjukkan hilangnya sentralitas keluarga sebagai andalan sektor pembangunan.

Pemapar selanjutnya yaitu Brigjen Pol Dr. Nico Afrita, S.I.K., S.H., M.H., memaparkan mengenai tingkat kejahatan *conventional crime, organized crime, and transnational crime*. Dalam kesempatan tersebut, Nico memaparkan mengenai keprihatinannya terhadap tingginya keterlibatan pelajar/mahasiswa dalam kejahatan, yaitu dalam kasus pencurian berat (pada 2017 terdapat 570 kasus), penganiayaan (pada 2017 terdapat 481 kasus), dan pencurian biasa (pada 2017 terdapat 417 kasus). “Yang mengkhawatirkan adalah terdapat tren yang meningkat pada kasus narkoba, yaitu mencapai 500 persen, dari 97 kasus pada tahun 2017, mencapai 451 kasus pada 2018,” kata Nico Afrita menjelaskan. Menurut Nico, tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana terorganisir yang paling banyak terjadi di Indonesia. Nico merekomendasikan adanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pihak terkait, yaitu POLRI, Kemendikbud, Pemda, Kementerian dan Lembaga terkait, LSM dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi pemuda yang terkait.

Outbond PPRA LIX

Memperkuat Kekompakan Peserta

Sebagai bagian dari proses pendidikan, peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LIX akan mengikuti kegiatan *outbond* yang dilaksanakan di Lido, Kabupaten Bogor selama 3 hari, yaitu pada hari senin hingga rabu, 4 sampai 6 Maret 2019. Dalam sambutan upacara pembukaan tersebut, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo yang dibacakan oleh

“Kegiatan *outbond* di alam terbuka ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan sesama para peserta sehingga hubungan personal kuat,” jelas Agus Widjojo. Diharapkan hubungan personal yang tumbuh ini tidak hanya selama proses pendidikan, tetapi berlanjut hingga para peserta selesai mengikuti pendidikan di Lemhannas RI.

Selama mengikuti kegiatan *outbond* ini, para peserta diminta untuk mempersiapkan fisik dan mentalnya karena kondisi cuaca yang



Kegiatan outbond di alam terbuka ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan sesama para peserta sehingga hubungan personal kuat

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Deputi Pendidikan Tk Nasional Mayjen TNI Karsiyanto menyebutkan bahwa kegiatan ini berguna untuk menjalin hubungan personal yang kuat di antara peserta. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan kekompakan sesama peserta sebelum mereka memulai pembelajaran di dalam kelas (*on campus*). Upacara pembukaan secara seremonial digelar untuk memberangkatkan para peserta.

ca yang akhir-akhir ini. “Selama *outbond*, nanti akan diberikan persoalan dan tantangan yang harus diselesaikan, keadaan cuaca dan medan latihan yang bervariasi memerlukan kesiapan fisik dan mental”, ungkap Agus. Para peserta dihimbau untuk mengikuti semua petunjuk instruktur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar lancar, aman, dan kesehatan pun terjaga. Semangat selama *outbond* diminta untuk tetap dijaga untuk mewujudkan solidaritas dan soliditas.

Gubernur Lemhannas RI Menjadi Narasumber dalam Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR RI

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo telah menghadiri sebuah Rapat Pleno Khusus Lembaga Pengkajian MPR RI bertema “Pertahanan, Ketahanan, dan Wilayah Negara”. Rapat Pleno yang dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. tersebut diselenggarakan dengan bertujuan untuk mendapatkan masukan tentang pembahasan mengenai Pertahanan, Ketahanan, dan Wilayah Negara dari beberapa narasumber antara lain; Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., termasuk Gubernur Lemhannas RI. Rapat tersebut berlokasi di Ruang GBHN Nusantara V MPR/DPR RI, pada hari Rabu (27/02).

Dalam Rapat Pleno tersebut, Agus Widjojo telah membahas tentang peran dan kewenangan alat negara berdasarkan UUD 1945. Agus Widjojo menyampaikan bahwa berdasarkan konstitusi, pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia. “Artinya yang melindungi itu adalah pemerintahan Indonesia, bukan langsung TNI, bukan langsung Polri,” jelas Agus Widjojo.

Pada Pasal 10 UUD 1945, Agus Widjojo mengatakan bahwa presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh karena itu, Agus Widjojo menekankan bahwa tugas TNI dilakukan berdasarkan keputusan presiden. “Tidak ada tugas yang dilakukan oleh TNI secara otomatis, harus melalui keputusan Presiden RI,” ujar Agus Widjojo.

Berdasarkan pertimbangan konstitusi tersebut, Agus Widjojo menyampaikan rekomendasi kebijakan agar TNI tetap berada di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Selain itu, Agus Widjojo juga mengusulkan agar proses transformasi Polri menjadi polisi sipil dilanjutkan.



Berdasarkan konstitusi, pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia. “Artinya yang melindungi itu adalah pemerintahan Indonesia, bukan langsung TNI, bukan langsung Polri”

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Renovasi Perluasan Upaya Memakmurkan Masjid Sudirman Lemhannas RI

Masjid di Lemhannas RI, yang dikenal sebagai Masjid Sudirman, sejak dibangun tahun 1995 telah menjadi bagian ibadah umat muslim di lingkungan Lemhannas RI.

Dari tahun ke tahun, tidak hanya pegawai Lemhannas saja yang menggunakannya, para peserta pendidikan dan pemantauan nilai-nilai kebangsaan, hingga warga sekitar Lemhannas kini juga memanfaatkan fasilitas masjid ini. Karena daya tampungnya sudah melebihi kapasitas jamaah, diputuskan untuk memperluas dan merenovasi masjid.

Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Pusat Dr. K.H. Samsul Ma'arif, M.A. yang hadir memberikan tausiyah (ceramah keagamaan) pada kegiatan peresmian perluasan Masjid Sudirman, Kamis (14/3) menyatakan upaya renovasi ini adalah bentuk pemakmuran masjid. "Memakmuran masjid", yang diambil katanya dari Al Quran surat At-Taubah ayat 18, jelas Ma'arif, mempunyai beberapa makna yaitu membangun atau mendirikan, mengisi dengan aktivitas ibadah, dan memelihara masjid tersebut.

"Jangan sampai dibangun dengan megah tapi tidak dipelihara dengan baik. Setelah diperluas, selain digunakan untuk shalat wajib lima waktu, syukur-syukur

digunakan juga kegiatan yang lain yang bisa memberikan kontribusi peningkatan keilmuan pemahaman keagamaan dan ketaatan pada Allah, untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara", pesannya.

Samsul Ma'arif lalu mengisahkan bagaimana Rasulullah SAW membangun masyarakat Madinah yang dimulai dengan membangun masjid terlebih dahulu. Masyarakat Madinah atau disebut Yatsrib sebelum datangnya Rasulullah SAW, dikenal sebagai masyarakat yang suka membuat onar dan kerusakan. Selama 10 tahun Rasulullah mampu menyelesaikan problema keumatan masyarakat Yatsrib dengan menjadikan Masjid Quba sebagai tempat aktivitas yang terkait dengan masyarakat, tidak hanya untuk ibadah secara ritual. Yatsrib pun diganti menjadi Madinah, berasal dari kata tamaddun yang berarti peradaban atau madani. "Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, Masjid Sudirman yang dibangun dengan megah ini tidak hanya sekedar meresmikan dan memperluas, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang lebih baik untuk membangun masyarakat madani," tutup Samsul pada ceramahnya.

Dari Dana Hibah

Perluasan Masjid Sudirman ini merupakan hibah dari PT. Teknoland Karya Jaya. Pada kegiatan peresmian ini, dilakukan pula penandatanganan serah terima berita acara hibah perluasan Masjid Sudirman dari Komisaris PT Teknoland Karya Jaya Ir. Darwis Ismail kepada Sekretaris Utama Lemhannas RI Komjen Pol Drs. Mochamad Iriawan, S.H., M.M., M.H. "Pembangunan masjid ini tidak sendiri oleh PT Teknoland Karya Jaya, tapi dibantu pihak-pihak lain yang berpartisipasi. PT Teknoland Karya Jaya hanya memulai dan berinisiatif," jelas Darwis dalam sambutannya.

Sementara itu, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak atas rampungnya renovasi perluasan Masjid Sudirman. "Masjid ini sebelumnya kurang layak karena antara lain shalat Jumat, jamaahnya penuh hingga harus melaksanakan shalat di lorong bawah. Kita harus bersyukur kepada Allah SWT karena telah memberikan jalan melalui para donator yang bersedia memberikan sebagian rezekinya untuk merenovasi Masjid Sudirman sehingga lebih luas," kata Agus. Peresmian perluasan inipun diakhiri dengan kegiatan santunan kepada 100 anak yatim sebagai bentuk rasa syukur. (nmvs)

Mari kita manfaatkan sebaik mungkin, Masjid Sudirman yang dibangun dengan megah ini tidak hanya sekedar meresmikan dan memperluas, tetapi juga diisi dengan kegiatan yang lebih baik untuk membangun masyarakat madani - Dr. K.H. Samsul Ma'arif, M.A



Pelatihan Membuat Power Point Untuk Pegawai Lemhannas RI

Biro Hubungan Masyarakat Lemhannas RI menyelenggarakan Pelatihan Power Point dengan tema “*Melukis Slide dengan Hati*” di Ruang Airlangga, Gedung Astagatra, Lt. III, Lemhannas RI, Selasa (14/3).



dok.humas/lri

untuk kita baca dan mengabaikan audiens,” tutur Endah.

Di hari kedua, Yanwar menyampaikan materi mengenai teknis dalam menggunakan aplikasi *remove background*, membuat tampilan lebih fokus, dan penggunaan *merge shape* agar indah dan kreatif. Endah juga menuturkan bahwa pesan visual yang terdapat pada power point bertujuan untuk menyederhanakan penjelasan yang bersifat rumit. Selain itu, Endah juga menjelaskan bahwa dalam pembuatan konten power point harus diketahui terlebih dahulu tujuan apa yang ingin dicapai dan juga jenis audiensnya. Pelatihan tersebut diselenggarakan selama dua hari pada 14 hingga 15 Maret dan dihadiri oleh 23 peserta perwakilan dari masing-masing biro dan kedeputian.

Pelatihan tersebut dibuka oleh Kepala Biro Humas Setama Lemhannas RI, Brigjen TNI Mindarto yang menyebutkan bahwa pelatihan ini sangat diperlukan bagi segenap staf di Lemhannas RI untuk mendukung pimpinan dalam memaparkan informasi.

Pelatihan tersebut menghadirkan narasumber Kepala Sub-Bagian hubungan Antar Lembaga Biro Humas Lemhannas RI Endah Heliana, S.Sos., M.Si. dan Yanwar Abidin, S.S., M.Si.Han. Kedua narasumber tersebut membawakan materi mengenai slide yang tidak efektif dan tantangan yang dihadapi, pengertian slide presentasi, prinsip desain slide presentasi, langkah *Chi of Love* mendesain presentasi, serta *white space* dan enam cara me-

nampilkannya.

Endah di awal paparannya mengatakan bahwa masih banyak terdapat ketidakefektifan yang dilakukan dalam menggunakan power point dengan terlalu banyak menampilkan tulisan yang memuat seluruh materi presentasi. Pada dasarnya, jelas Endah Heliana, Power Point haruslah menampilkan slide presentasi yang lebih menarik, memberikan inspirasi dan *visual story* kepada audiens, memiliki alur sistematis, dan sederhana.

Endah menjelaskan bahwa terdapat beberapa pilar power point yaitu konten harus sudah disiapkan sebelum dituangkan ke dalam power point. Pilar selanjutnya, power point haruslah memuat visual yang bertujuan untuk memperkuat pesan verbal yang ingin disampaikan. “Power Point bukanlah merupakan bahan materi



Power Point bukanlah merupakan bahan materi untuk kita baca dan mengabaikan audiens

Endah Heliana, S.Sos., M.Si

Lemhannas RI Tandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang

Gubernur Lemhannas RI, Letjen (TNI Purn) Agus Widjojo menyampaikan sambutannya saat penandatanganan nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang (USM) bertempat di Gedung Trigatra Lt. I, Lemhannas RI (15/3).

Nota kesepahaman antara Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang, yang merupakan wujud komitmen bersama untuk menjalin kerja sama,” kata Agus Widjojo.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula secara umum nota kesepahaman Lemhannas RI dengan kedua institusi meliputi, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan; pelaksanaan pengkajian, penelitian dan pertukaran informasi dalam rangka pengukuran ketahanan nasional; pertukaran tenaga ahli/pakar/ akademisi dan pemantapan nilai-nilai kebangsaan; serta bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati para pihak.

Agus Widjojo juga menyampaikan harapannya bahwa dengan telah ditandatanganinya dokumen nota kesepahaman Lemhannas RI dengan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Universitas Semarang, diharapkan tidak sekedar menjadi acara seremonial semata, namun perlu ada implementasi dalam kegiatan nyata secara konsisten terkait dengan bidang-bidang yang ada di dalam ruang lingkup yang dikerjasamakan.

Dalam waktu dekat, kerja sama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia akan dilaksanakan pelatihan pemantapan nilai-nilai kebangsaan dengan peserta kurang lebih 100 orang, oleh Kedeputusan Taplai Lemhannas RI.

Sedangkan bersama Universitas Semarang akan dilaksanakan pelatihan yang sama untuk para pengajar/dosen dan staf serta mahasiswa, di mana dalam pelaksanaannya akan di gabungkan dengan institusi lain guna memenuhi kuota kelas yang tersedia.

Agus Widjojo melanjutkan bahwa sinergitas antara ketiga institusi ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya bersama dalam memperkuat wawasan kebangsaan sebagai prasyarat mutlak dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh. “Dengan demikian potensi yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan kedua institusi ini dapat saling bersinergi guna menghasilkan capaian dan sasaran yang lebih optimal,” kata Agus Widjojo.



Gubernur Lemhannas RI Jadi Narasumber Dialog Wawasan Kebangsaan di Batam TV

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menjadi Narasumber dalam acara Dialog Khusus yang ditayangkan di Batam TV, pada Senin (25/2), di Batam, Kepulauan Riau.

Dialog Kebangsaan yang mengangkat tema “Pemanjapan Nilai-Nilai Kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa” tersebut merupakan salah satu rangkaian acara dalam Program Pemanjapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI yang dilaksanakan di Batam.

Dalam Dialog Kebangsaan tersebut, Agus Widjojo berbicara mengenai pandangannya terhadap komitmen masyarakat dalam berbangsa dan bernegara saat

ini serta pandangan Lemhannas RI terhadap kekhawatiran para orang tua pada generasi muda yang cenderung kurang memahami Nilai-Nilai Kebangsaan.

Terkait dengan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2019 nanti, Agus Widjojo juga mengungkapkan pandangan Lemhannas RI terhadap situasi politik nasional saat ini, dan juga menanggapi adanya hoaks (berita bohong) yang disebar oleh kelompok tertentu.

Di akhir wawancara, Agus Widjojo mengungkapkan harapannya sebagai

Gubernur Lemhannas RI untuk generasi muda agar selalu dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mencegah masuknya paham-paham radikal yang bisa memecah belah bangsa.

Dialog khusus mengenai wawasan kebangsaan tersebut juga menghadirkan dua narasumber lainnya yaitu Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.SI., dan Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji Prof. Dr. Syafsir Akhlus, M.Sc..



RDP Lemhannas RI dengan Komisi I DPR RI

Lemhannas RI yang dipimpin oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara, DPR RI, Rabu (30/1). RDP yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung, S.IP. ini membahas mengenai Evaluasi Capaian Kinerja Lemhannas RI Tahun 2018 dan Rencana Kerja Lemhannas RI tahun 2019.

Dalam paparannya di hadapan Komisi I, Agus Widjojo menyampaikan bahwa dari anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 288.239.118.000,-, capaian kinerja anggaran Lemhannas RI adalah 99,06% sebesar Rp. 285.563.266.909,-. Agus Widjojo juga mengatakan bahwa Lemhannas RI di tahun 2017 mendapatkan predikat "Wajar Tanpa Pengecualian" dari BPK RI atas hasil pemeriksaan pengelolaan anggaran Lemhannas RI di tahun 2017 dan mendapat predikat "B" dari Kemenpan RB atas hasil evaluasi SAKIP dan implementasi reformasi birokrasi tahun 2017.

Mengenai rencana kerja di tahun 2019, lanjut Agus widjojo, Lemhannas RI mendapat Rp. 201.379.786.000,-. Agus Widjojo kemudian memaparkan bahwa anggaran tersebut dibagi menjadi tiga fokus yaitu anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 137.320.648.000,-, anggaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur sebesar Rp.

1.789.863.000,-, dan anggaran pengembangan ketahanan nasional Rp. 62.269.275.000,-.

Anggaran dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, jelas Agus Widjojo, dibagi ke dalam lima layanan yaitu Layanan Humas, Layanan Perencanaan, Layanan Umum, Layanan Kerja Sama, dan Layanan Telematika. Sementara untuk anggaran pengembangan ketahanan nasional dibagi ke empat bagian yaitu Kedeputian Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional, Kedeputian Pengkajian Strategik, Kedeputian Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, dan Pusat Laboratorium.

Rapat tersebut kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme, politik, serta kajian-kajian yang dilakukan Lemhannas RI.

Di akhir rapat tersebut, Asril Hamzah Tanjung mengemukakan beberapa kesimpulan dari RDP yaitu komisi I meminta Lemhannas RI untuk melakukan kajian dalam upaya menangkal eskalasi bahaya *money politics* dalam berbagai

level kegiatan politik serta bahaya yang ditimbulkan sebagai ancaman demokrasi dan budaya dalam masyarakat. Kesimpulan kedua, jelas Asrim Hamzah Tanjung, Komisi I meminta Lemhannas RI untuk tetap melakukan diseminasi informasi hasil kajian terkait politik nasional kepada masyarakat secara selektif.

Terkait dengan menghangatnya isu di masyarakat terkait dengan surplus kepangkatan perwira tinggi dan menengah di organisasi TNI, Asril Hamzah Tanjung mengungkapkan bahwa Komisi I meminta Lemhannas RI untuk ikut melakukan kajian guna membantu tata kelola jabatan dan kedinasan di lingkungan TNI serta rekomendasi solusi penyelesaiannya.

Dalam rapat tersebut, Gubernur Lemhannas RI didampingi oleh Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Mayjen TNI Karsiyanto, Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Mayjen TNI (Mar) Guntur Irianto Ciptolelono, Plt Deputi Pengkajian Brigjen Pol Drs. Basuki, M.M., Para Kepala Biro Lemhannas RI, Tenaga Profesional Lemhannas RI serta beberapa staf





Jelang Pemilu, Lemhannas Diskusi dengan Pemred Media Massa

Menyikapi situasi menjelang Pemilu 2019 yang semakin memanas, Lemhannas RI menggelar kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, Rabu (20/3), di Ruang Konstitusi Gd. Trigatra Lt. III.

Forum ini merupakan program rutin Lemhannas RI untuk menyamakan persepsi dengan awak media sebagai penyedia informasi *mainstream* di masyarakat yang mempunyai peran dalam proses demokratisasi, sekaligus menjadi ajang silaturahmi pimpinan Lemhannas RI dengan pemimpin redaksi (pimred) media massa.

Bertajuk “Mengkritisi Perkembangan Situasi Jelang Pemilu 2019”, Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan Lemhannas RI sedang mengkaji sebuah perkiraan tingkat kerawanan menjelang Pemilu 2019, terutama pilpres, dari perspektif ketahanan nasional. “Lemhannas menggunakan tiga pendekatan analisis yaitu perbandingan kondisi final Pilpres 2014, pengukuran ketahanan nasional 2018 yang sifatnya relatif final meskipun masih dalam pemantauan, dan kondisi realita yang sifatnya dinamis dengan penyesuaian dan pemutakhiran situasi”, jelas Agus. Dilihat dari ketiga pendekatan tersebut, ketahanan nasional masa pilpres cukup kondusif yang dianggap agak mirip dengan kondisi tahun 2014 lalu, meskipun ada beberapa wilayah yang berada pada kondisi kurang kondusif seperti di Aceh,

Maluku Utara, Jawa Barat, NTT, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan kekhawatirannya tentang pergeseran arti relawan dan peran masyarakat sipil sebagai kelompok kekuatan tengah. “Wilayah independen *civil society* akan diambil pelaku politik. Ini yang akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Relawan itu partisan atau non partisan. Relawan kadang lebih galak dari anggota parpol”, ungkap Agus. Menurutnya diperlukan pembangunan kekuatan kelompok tengah untuk mencegah perpecahan.

Dalam acara yang dimoderatori oleh Haryanto Saputra, beberapa pemred yang hadir mengungkapkan peran media yang independen dan kredibel dalam memberitakan situasi saat ini. Seperti Pemred Harian Kompas, Ninuk Pambudy yang menyatakan meskipun

di bawah redaksi, divisi Litbang Kompas tetaplah independen. “Meskipun anggarannya dari redaksi, Litbang Kompas menyusun metodologi dan memilih tenaga *surveyor*-nya sendiri”, kata Ninuk.

Sementara itu, Aryo Ardi dari INews TV menyatakan meskipun stasiunnya dimiliki oleh seseorang yang berpolitik, mereka berkomitmen untuk memberitakan informasi terkait Pemilu secara independen. “Secara media, kita berimbang. Kita tidak mengambil porsi tayang yang lebih untuk salah satu partai yang dipimpin oleh pemilik stasiun ini”, ungkapnya.

Selain itu perwakilan dari TV One, IDN Times, RRI, dan MNC TV mengungkapkan perlunya merangkul generasi milenial yang mempunyai karakter berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, terutama dalam memandang masalah kebangsaan dan keindonesiaan.

Wilayah independen civil society akan diambil pelaku politik. Ini yang akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. Relawan itu partisan atau non partisan. Relawan kadang lebih galak dari anggota parpo



Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Menyikapi Polarisasi dan Informasi Hoaks Jelang Pemilu 2019

Hiruk pikuk jelang Pemilu 2019 yang menghiasi berbagai surat kabar kini telah masuk ke ranah privat pada ponsel pintar yang selalu kita bawa. Banjirnya informasi tentang kandidat peserta pemilu hingga berita-berita yang sumbernya tidak jelas kini telah menjadi makanan sehari-hari. Belum lagi dengan berbagai manuver kandidat calon presiden yang menggalang dukungan, dari mulai majelis ta'lim hingga kampus-kampus. Masyarakat pun terlihat terbelah dengan dianggap mendukung sana dan sini.

Fenomena yang muncul menjelang pemilu ini menjadi topik bahasan dalam acara Forum Komunikasi Pimpinan Lemhannas RI dengan Pemimpin Redaksi Media Massa, Rabu (20/3), di Ruang Konstitusi Gd. Trigatra Lt. III. Selain pimpinan dan pejabat struktural Lemhannas RI, pemimpin redaksi (pemred) berbagai media massa terkemuka antara lain The Jakarta Post, Harian Kompas, Inews TV, TV One, RRI, Trans TV, Berita Satu, IDN Times, MNC, Kompas TV, Jawapost TV, dan Metro TV ikut terlibat aktif dalam diskusi.

Perlunya Membangun Kekuatan Tengah

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyampaikan kekhawatirannya dalam proses demokrasi Indonesia saat ini. Para kandidat yang bersaing dalam pemilu ingin merebut pengaruh semua kelompok. "Ibaratnya kalau ada tanah kosong yang belum punya pemilik tegas dengan sertifikat atau HGB, itu selalu dicari dan selalu ingin diambil. Ini memperebutkan wilayah independen dari *civil society*, akan diambil pelaku politik. Ini yang akan menimbulkan polarisasi masyarakat," ungkapnya.



Fenomena lain adalah relawan di Indonesia yang mengalami pergeseran makna. Di negara lain, relawan dalam kampanye politik yang mendukung salah satu calon sifatnya non partisan dan akan kembali ke ranahnya masing-masing begitu pemilihan umum telah usai. Di Indonesia, relawan cenderung fanatik, melibatkan emosi, dan kadang kala lebih militant daripada anggota partai. Para relawan dilihat mempunyai tujuan tertentu yang ingin mereka capai. “Kata relawan menjadi kata semu karena tidak didasarkan pada arti kata sesungguhnya berdasarkan kesukarelaan”, kata Agus.

Agus Widjojo lalu mengungkapkan perlunya menciptakan ruang independen dan membuat kekuatan tengah untuk bisa menjadi penyalur dari polarisasi yang terjadi di masyarakat. Komponen untuk membangun kekuatan tersebut cukup banyak dan besar, tetapi komponen itu justru diperebutkan oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu. Komponen kekuatan tengah ini diharapkan dapat mencegah perpecahan.



Berpihak pada salah satu kandidat bukanlah hal tabu. Media di Amerika melakukan itu setiap pilpres, dengan pertimbangan independensi dan pertimbangan kandidat yang dirasa membawa kebaikan

Uni Lubis
Pemimpin Redaksi IDN Times

Bahaya Hoaks

Implikasi revolusi teknologi informasi salah satu diantaranya adalah produksi berita bohong (hoaks) yang digunakan untuk tujuan tertentu. “Pada bidang politik, berita-berita semacam ini sangat efektif untuk melakukan perusakan kepada kubu-kubu yang berlawanan,” ungkap Agus. “Gejala ini tidak di Indonesia saja, tetapi juga dirasakan oleh negara manapun karena Amerika pun masih bergumul dengan implikasi ini dan belum selesai”, tambahnya.

Data Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) menyebutkan bahwa ada sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. Kominfo mendeteksi terjadi peningkatan peredaran berita bohong pada bulan Januari yang jumlahnya lebih dari 70 hoaks. Jumlah itu mengalahkan angka total hoaks yang terjadi selama 2018 yang hanya sekitar 60-an isu.

Pers Menjaga Kredibilitas

Peran pers sangat penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas, tetapi pers juga tidak dapat dilepaskan dari kepentingan-kepentingan tertentu atau dengan kekuatan politik tertentu. Menanggapi hal tersebut, Pemimpin Redaksi *The Jakarta Post* Nezar Patria menjelaskan independensi dan keberimbangan adalah wajib bagi sebuah media massa professional. “Independensi artinya tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar jurnalistik. Berimbang, melaporkan dengan lebih benar sesuai kaidah untuk mendapat akurasi sebuah kebenaran berita”, jelas Nezar.

“Media massa netral itu mustahil, karena kita tidak hidup di ruang kosong”, tambah Nezar. Di negara demokrasi ratusan tahun seperti Amerika Serikat (AS), media memihak salah satu calon yang dirasa mempunyai visi yang sama dengan media massa tersebut dalam membangun negaranya. Pemimpin Redaksi *IDN Times* Uni Lubis mengungkapkan hal yang sama. “Berpihak pada salah satu kandidat bukanlah hal tabu. Media di Amerika melakukan itu setiap pilpres, dengan pertimbangan independensi dan pertimbangan kandidat yang dirasa membawa kebaikan”, ungkap Lubus. Uni Lubis pun menambahkan bahwa tidak ada media yang netral, baik secara teori maupun secara praktik. “Yang dibutuhkan media adalah independen, objektif, berimbang. Tidak ada netralitas dalam media massa karena ketika memilih sumber pun awak media sudah tidak bisa netral,” jelasnya.

Independensi dan keberimbangan media massa inipun disepakati oleh Pemimpin Redaksi *Harian Kompas* Ninuk Pambudy dan. Seperti *Harian Kompas* misalnya, meskipun divisi penelitian dan pengembangan (litbang) berada di bawah redaksi secara struktur, tetapi redaksi tidak melakukan intervensi konten, metodologi, dan proses pelaksanaan survey yang sering tampil di *Harian Kompas*. “Kompas menjaga profesionalitas dan independensinya dalam peliputan. Litbang, yang berada di bawah redaksi, melakukan semuanya sendiri,” imbuh Ninuk.



Merangkul Milenial

Berdasarkan hasil survey Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam riset Prioritas Nasional yang dilakukan tahun 2018 kemarin, dari total 185 juta pemilih, sekitar 80 juta pemilih atau 35%-40% dari total jumlah pemilih adalah generasi milenial. Peran generasi milenial dalam pemilu mendatang menjadi penting.

Yang perlu menjadi pertimbangan bersama adalah generasi milenial tidak paham dengan konsekuensi yang mereka pilih. Generasi ini tertarik untuk mencari sistem politik alternatif yang berbeda dari sekarang. "Mungkin mereka tidak menempatkan dirinya secara aktif dalam memilih keinginan itu, tetapi itu sebagai reaksi terhadap ketidakpuasan tatanan yang ada selama ini yang tidak membawa hal-hal yang mereka harapkan. Tatanan sekarang ini mereka rasa tidak memikirkan mereka dan masa depan mereka. Ini adalah reaksi mencari alternative," jelas Agus Widjojo.

Uni Lubis pun menyatakan hal senada. "Bisa jadi itu adalah bentuk perlawanan atau ketidakpuasan terhadap yang mereka lihat sekarang. *Concern* mereka adalah pekerjaan, pendidikan, dan kondisi ekonomi. Hal-hal ini tidak banyak yang muncul pada diskusi selama masa kampanye. Mereka ingin pemimpin jujur dan bisa memberikan ekonomi yang lebih baik," imbuhnya.

Pesan Agus, pejabat publik dan jabatan publik harus mampu menjalankan perannya dengan baik. "Jangan main-main dengan kewenangan tersebut. Jabatan politik, jabatan publik adalah pilar demokrasi, yang terkandung *trust* masyarakat. Bahaya jika masyarakat kehilangan *trust* atas tatanan-tatanan ini," jelasnya. (nmvs)



Jangan main-main dengan kewenangan tersebut. Jabatan politik, jabatan publik adalah pilar demokrasi, yang terkandung trust masyarakat. Bahaya jika masyarakat kehilangan trust atas tatanan-tatanan ini

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri Sukses diselenggarakan di Aceh

Kedeputan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan sukses menyelenggarakan Dialog Wawasan Kebangsaan Bagi Birokrat, Akademisi, Tokoh Masyarakat, TNI dan Polri di Daerah Istimewa Aceh pada 12-14 Maret 2019 yang lalu.

Dalam kesempatan tersebut, diberikan materi mengenai nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari pengantar nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan UUD NRI Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, NKRI serta perkembangan lingkungan strategis. Kegiatan tersebut diikuti oleh 100 orang peserta yang terdiri dari birokrat 34 orang, akademisi 24 orang, tokoh masyarakat 21 orang, tokoh pemuda 6 orang, tokoh Agama 5 orang, LSM 4 orang, TNI 5 orang dan Wartawan 1 orang.

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memberikan amanat kepada para peserta saat sambutan pembukaan dan di hari penutupan kegiatan tersebut. “Selama tiga hari berturut-turut,

Saudara-Saudara telah mengikuti dan menyelesaikan kegiatan dialog wawasan kebangsaan, yang dikemas dalam bentuk ceramah dan diskusi tentang nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agus Widjojo.

Meskipun diselenggarakan dengan waktu yang relatif singkat, para peserta telah memahami dan menyadari arti pentingnya nilai-nilai kebangsaan bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih demokratis, aman, damai, dan sejahtera. Agus menyampaikan, bahwa seluruh rangkaian kegiatan dialog wawasan kebangsaan ini bertujuan untuk menggugah semangat dan lebih memperkuat pemahaman nilai-

-nilai kebangsaan yang merupakan bagian dari proses pembangunan watak dan karakter bangsa yang bersumber pada Empat Konsensus Dasar Bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Dengan motivasi wawasan kebangsaan yang kuat, dan didorong tekad yang bulat untuk mempertahankan kehidupan bangsa, diharapkan berbagai perbedaan dan permasalahan yang dihadapi dapat Saudara-Saudara kelola dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, integral dan holistik dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Agus pada saat upacara penutupan kegiatan tersebut.



Diharapkan berbagai perbedaan dan permasalahan yang dihadapi dapat Saudara-Saudara kelola dengan pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang komprehensif, integral dan holistik dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Kebutuhan Organisasi, Lemhannas RI Lantik dan Rotasi Sejumlah Pejabat

Lemhannas RI melakukan pelantikan dan pengangkatan sumpah janji bagi sejumlah eselonnya, Kamis (21/3), di Aula Gedung Trigatra.

Pelantikan dan rotasi yang dilakukan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan kinerja organisasi untuk memaksimalkan kinerja lembaga. Proses pemilihan sejumlah pejabat eselon ini melalui proses mekanisme dan pertimbangan berdasarkan kebutuhan organisasi dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo menyatakan, pelantikan dan pengangkatan pejabat dalam suatu organisasi bukan sekedar kepercayaan dan kehormatan semata, tetapi juga amanah, tantangan, serta ujian. "Saya berpesan agar melaksanakan amanah ini secara sungguh-sungguh, ikhlas, dan memberikan yang terbaik bagi Lemhannas RI. Harus ada semangat untuk mengidentifikasi kekurangan dan berusaha meningkatkan kinerja di bidang tugas masing-masing," pesan Agus. Agus melanjutkan, "Setiap tugas yang diemban hendaknya dihayati, apa peran tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan pada jabatan masing-masing. Sepenuhnya berupaya untuk memenuhi kompetensi jabatan."

Pelaksanaan kegiatan pelantikan dan pengangkatan sumpah janji ini berdasarkan Keputusan Gubernur Lemhannas RI No. 38, 39, 41 dan 44 Tahun 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan jabatan di lingkungan Lemhannas RI. Sejumlah 39 orang pejabat dilantik menempati jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Selain itu juga terdapat beberapa pejabat yang dilepas di antaranya perwira tinggi TNI bintang 2 dan perwira tinggi bintang 1 yang menempati jabatan di kesatuannya.



Setiap tugas yang diemban hendaknya dihayati, apa peran tanggung jawab dan tugas yang harus dilaksanakan pada jabatan masing-masing. Sepenuhnya berupaya untuk memenuhi kompetensi jabatan

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI



Gubernur Lemhannas RI Buka PPSA XXII Lemhannas RI

Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXII Lemhannas RI Tahun 2019 secara resmi dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo pada Selasa (26/3) di Ruang Dwi Warna Purwa Lemhannas RI.



dok.humas/iri

Pembukaan yang dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional Lemhannas RI, diawali dengan laporan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI Karsiyanto.

Dalam laporannya, Karsiyanto melaporkan bahwa PPSA XXII diselenggarakan selama 5,5 bulan dengan dua tahap, tahap pertama selama 1 bulan yaitu orientasi, *outbond* dan pembelajaran jarak jauh (*off campus*). Sedangkan tahap kedua yaitu, selama 4,5 bulan pembelajaran di Lemhannas RI (*on campus*) yang terdiri dari ceramah, diskusi, Studi Strategis Luar Negeri (SSLN), Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN), Penulisan Karya Kertas Ilmiah Perseorangan (Taskap) dan Seminar.

Peserta PPSA XXII Lemhannas RI Tahun 2019 ini berjumlah 80 orang yang berasal dari TNI AD 16 orang, TNI AL 8 orang, TNI AU 6 orang, Polri 15 orang, Kementerian 19 orang, Kopertis 5 orang, Kadin Indonesia 3 orang, Organisasi Masyarakat 5 orang, dan Tokoh Masyarakat 3 orang.

Dalam sambutan Gubernur Lemhannas RI, Agus Widjojo mengawali ucapan selamat kepada seluruh peserta yang terpilih untuk mengikuti PPSA XXII Lemhannas RI Tahun 2019. “Keterpilihan saudara sekalian sebagai peserta PPSA XXII Lemhannas RI merupakan suatu anugerah Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang patut saudara syukuri. Hal ini” ucap Agus Widjojo.

Namun Agus Widjojo mengingatkan bahwa mengikuti pendidikan di Lem-

hannas RI bukan semata-mata mengejar formalitas saja. “Diharapkan para peserta dalam program pendidikan ini dapat termotivasi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan masing-masing dengan menjalankan perannya sebagai peserta pendidikan yang bertanggung jawab dan bukan semata-mata hanya mengejar formalitas pendidikan di Lemhannas RI,” harapnya.

Agus Widjojo menilai bahwa memiliki kemampuan akademis dan kewenangan dalam jabatan, tidaklah cukup untuk menjadi pemimpin tingkat nasional, terlebih bagi bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia. Kemampuan menjalin kerjasama dan membangun jaringan antar para pejabat setelah lulus pendidikan sungguh merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan.



Memiliki kemampuan akademis dan kewenangan dalam jabatan, tidaklah cukup untuk menjadi pemimpin tingkat nasional, terlebih bagi bangsa yang besar dan majemuk seperti Indonesia

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

Selain itu, lanjut Agus Widjojo, etika, moral dan kejujuran juga merupakan prasyarat lain yang harus dimiliki untuk membentuk karakter pemimpin yang memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak berdasarkan pandangan geopolitik dan geostrategi Indonesia yang komprehensif, integral dan holistik.

Agus Widjojo juga menekankan bahwa keberadaan para peserta di Lemhannas RI, harus disertai dengan tekad untuk melakukan revolusi mental transformasi sikap dan perilaku yang mencerminkan sosok kader pimpinan tingkat nasional dengan kualitas karakter kebangsaan yang kuat.

“Revolusi mental untuk membentuk karakter kepemimpinan yang kuat tidaklah hanya diberikan dengan mengajarkan sifat-sifat mental yang baik, tetapi juga dengan menunjukkan bukti nyata para peserta mengikuti dan mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang dipersyaratkan oleh lembaga untuk memenuhi persyaratan kelulusan para peserta. Kesadaran mematuhi segala ketentuan akan

membentuk karakter kepribadian yang menjadi sumbangan perseorangan peserta bagi proses revolusi mental secara nasional,” jelasnya

Mengingat lamanya pendidikan yang ditempuh selama 5,5 bulan, Agus Widjojo juga mengingatkan kepada peserta terkait kesiapan fisik dan mental harus menjadi perhatian seluruh peserta karena kegiatan pendidikan yang akan menyita dan menguras waktu, tenaga serta pikiran.

Program Pendidikan di Lemhannas RI berfungsi untuk mempertajam dan meningkatkan kapasitas dan efektivitas kepemimpinan dan berpikir strategis sekaligus menjadi penyegaran dan investasi untuk memperkaya kapasitas peserta ketika diperlukan untuk berkarya di lapangan setelah lulus.

“Hasil yang akan dicapai dari mengikuti pendidikan ini menjadikan para peserta lebih lengkap memiliki pengetahuan dan kemampuan membuat analisis dan keputusan serta berfikir strategis sebagai seorang pemimpin. Para peserta



dok.humas/ri

Kemampuan menjalin kerjasama dan membangun jaringan antar para pejabat setelah lulus pendidikan sungguh merupakan keniscayaan yang tidak dapat diabaikan

Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo
Gubernur Lemhannas RI

harus bisa memberi nilai tambah bagi diri sendiri pada saat selesai mengikuti pendidikan nanti,” terang Agus Widjojo.

Agus Widjojo juga mengingatkan kepada seluruh peserta bahwa proses belajar-mengajar di Lemhannas RI bukan untuk bersaing dengan rekan mitra sesama peserta, tetapi setiap individu peserta diberi tantangan untuk berlomba dengan diri sendiri, dan akan terlihat ketika selesai mengikuti proses belajar-mengajar.

“Para peserta menjadi individu yang berbeda dalam pengetahuan, keterampilan analisis serta dalam wawasan kebangsaan yang lebih berkualitas dari masa sebelumnya. Lemhannas RI tidak mengajarkan lomba kepandaian antar peserta, kepandaian hanya memiliki kualitas dan nilai manfaat bukan dicerminkan oleh nilai yang didapat dari sekolah, tetapi ditentukan oleh nilai manfaat dan efektivitas kegunaan ketika bertugas di lapangan,” terang Agus Widjojo.

Turut hadir dalam pembukaan tersebut adalah Mantan Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, SH, M.H.,M.S dan Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji, DEA, Perwakilan dari Panglima TNI, Kapolri, Kepala Staf Angkatan, Kementerian/Lembaga, dan institusi asal peserta.





MENINGKATKAN PERAN GENERASI MILENIAL GUNA MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL

Brigjen TNI Dr. Anton Nugroho, M.M.D.S., M.A.

Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVII Lemhannas RI;
Tenaga Ahli Pengkaji Madya
Bidang Hankam Lemhannas RI

Kewaspadaan nasional suatu bangsa ditentukan oleh kekuatan karakter bangsa tersebut. Bangsa Indonesia mempunyai karakter yang berisi nilai nilai Pancasila yang merupakan dasar negara dan sebagai landasan ideologis yang harus diamalkan dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia. “Kewaspadaan nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa perduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dari suatu ancaman.”¹

Dalam era globalisasi yang membawa modernisasi dan kemajuan teknologi serta komunikasi telah menurunkan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia yang digali dari nilai nilai budaya nenek moyang kita pelan-pelan mulai tergerus dan tersingkirkan dengan pengaruh budaya barat yang liberal. Hal ini bisa dilihat dari karakter dan sikap generasi muda sekarang yang sudah jauh dari nilai-nilai patriotisme, sebagai contoh gaya hidup kebarat-baratannya, malu menggunakan produk dalam negeri, berpakaian yang minim, hedonisme (berhura-hura) serta radikalisme dan lain sebagainya, padahal generasi muda sekarang ini jauh lebih pintar dan cerdas dari pada generasi sebelumnya. Mereka mempunyai banyak keunggulan yang mampu berkompetisi di dunia internasional. Seperti pepatah “ilmu

tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh”.² Pendidikan karakter yang ada selama ini di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi masih belum kuat mempengaruhi dan membentuk karakter generasi muda tersebut agar memiliki jiwa cinta tanah air Indonesia.

Esai ini akan menulis hipotesis tentang “bagaimana meningkatkan peran generasi milenial guna menghadapi persaingan global”. Adapun maksud dan tujuannya adalah untuk mendiskusikan tentang bagaimana kondisi tantangan generasi milenial di era globalisasi serta bagaimana upaya meningkatkan pendidikan karakter bagi generasi milenial sehingga mereka akan lebih cinta tanah air Indonesia yang dapat mendukung kewaspadaan nasional.

Teknologi Informasi

Generasi Milenial adalah Generasi Y yang lahir antara tahun 1981-1994. Secara umum ciri ciri generasi ini adalah memiliki rasa percaya diri, optimistis, ekspresif, bebas, dan menyukai tantangan, terbuka terhadap hal-hal baru dan selalu ingin tampil beda dari yang lain. Mereka benar-benar menggunakan kreativitasnya untuk menciptakan sesuatu yang baru, menyukai suasana kerja yang santai dan mampu mengerjakan beberapa hal secara bersamaan (*multitasking*). Mereka termasuk peduli terhadap gaya (*style*) dan cepat beradaptasi dengan teknologi Informasi. Sayangnya, generasi ini mudah bosan dan loyalitasnya dalam

urusan pekerjaan terbilang kurang.³ Di Indonesia sendiri dari jumlah 255 juta penduduk yang telah tercatat, terdapat 81 juta merupakan generasi millennial atau berusia 17- 37 tahun.⁴ Hal ini berarti Indonesia memiliki banyak kesempatan untuk membangun negaranya.

Perkembangan teknologi informasi sangat mempengaruhi peran generasi milenial. Melalui internet infiltrasi ideologi lain sangat mudah masuk mempengaruhi generasi milenial seperti sifat konsumerisme, individualisme, dan pornografi, dan mempromosikan kebencian berbasis suku, agama, ras, dan gender (SARA). Kelompok teroris ISIS dan Al-Qaida juga piawai menggunakan internet untuk merekrut mereka untuk menjadi radikal seperti teroris. Di perkiraan 132 juta orang Indonesia sudah terhubung dengan internet. Sebanyak 65 juta diantaranya mengakses internet lewat *smartphone*.⁵ Bahkan “Presiden Jokowi berharap masyarakat tetap waspada dan terus memegang teguh Pancasila dalam rangka memenangkan pertarungan ideologi dengan negara lain. Dirinya juga mengingatkan bahwa pertarungan ideologi belum selesai dan masih akan terus berlanjut.”⁶ Melihat kondisi ini perlu ada langkah langkah untuk penguatan nilai nilai karakter generasi milenial dalam menghadapi era globalisasi saat ini dengan cara penguatan pendidikan karakter di sekolah dan di perguruan tinggi agar nilai nilai karakter kebangsaan menjadi lebih kuat sehingga sulit ditembus ideologi lain.

Penguatan karakter

Penguatan karakter harus mengikuti sistem pendidikan nasional. Dalam pembinaan generasi milenial melalui pendidikan karakter harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 menjelaskan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"⁷. Dari undang-undang tersebut sudah menjelaskan bagaimana watak dan karakter yang diharapkan sehingga perlu diimplementasikan yang maksimal di lembaga pendidikan.

Output dari penguatan pendidikan karakter adalah meningkatnya jiwa patriotisme. Penguatan karakter merupakan upaya untuk mengimbangi perubahan globalisasi yang berisi ancaman ideologi lain terhadap generasi milenial. "Terdapat lima nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila yang menjadi prioritas pengembangan gerakan Penguatan Pendidikan Karakter; yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotongroyongan. Masing-masing nilai tidak berdiri dan berkembang sendiri-sendiri tetapi saling berinteraksi satu sama lain, berkembang secara dinamis, dan membentuk keutuhan pribadi."⁸ Dengan metode ini diharapkan karakter generasi milenial menjadi lebih cinta kepada tanah air dibanding dengan negara lain sehingga watak dan pribadinya menjadi kuat dan tidak mudah dipengaruhi dan ditembus oleh ideologi lain.

Hasil karya generasi milenial dalam kompetisi global antara lain. Pertama, tumbuhnya ekonomi kreatif. Mayoritas generasi milenial menginginkan banyak kemudahan dan serba cepat. Hal ini menumbuhkan banyak aplikasi *mobile*

shopping dan *entrepreneur e-commerce* di Indonesia. pasar *e-commerce* menjadi incaran banyak pebisnis. Bahkan Badan Ekonomi Kreatif pun mendukung *e-commerce* dengan menjadikannya program nasional. Kedua, gerakan sosial karena dekat dengan teknologi dan internet tak membuat generasi ini anti sosial. Saat ini cukup banyak *platform* gerakan sosial di internet yang menyerukan kepedulian dan perubahan terhadap berbagai isu. Mulai dari sosial, pendidikan, lingkungan, kesehatan dan berbagai isu lainnya. Ketiga, transportasi *online*. Ojek *online* adalah salah satu bentuk transformasi yang dilakukan generasi milenial dalam menghadapi permasalahan kemacetan di ibu kota. Generasi ini tak hanya cermat melihat potensi pertumbuhan teknologi, tetapi juga menciptakan *trend* baru yang berdampak dan mendatangkan nilai ekonomi. Keempat, *go green*, Penggunaan *e-book* tak hanya sekadar memberikan kemudahan tetapi sebagai bentuk dukungan generasi milenial terhadap kampanye *go green*. E-book tidak memerlukan kertas, tinta dan bahan lain untuk membuat buka cetak.⁹

Jiwa patriotisme generasi milenial akan mendukung kewaspadaan nasional. Pembinaan dan pengarahan kepada generasi milenial sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Penanaman nilai nilai karakter yang bersumber dari Pancasila akan menimbulkan jiwa patriotisme dan akan membuat mereka berani tampil membawa nama besar Indonesia dengan hasil karya mereka yang fenomenal khususnya dalam bidang digital. Sudah banyak perubahan dunia yang terjadi dengan karya digital di era globalisasi ini, banyak kemudahan yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan jiwa patriotisme yang kuat akan meningkatkan kewaspadaan nasional bangsa Indonesia. Dengan kewaspadaan nasional tersebut maka bangsa Indonesia tidak akan mudah diinfiltrasi oleh ideologi lain yang akan menghancurkan Indonesia.

Generasi milenial adalah generasi yang hidup dalam era globalisasi yang hebat dalam bidang teknologi informasi namun mu-

dah terpengaruh oleh infiltrasi ideologi lain seperti liberalisme, kapitalisme dan radikalisme. Penguatan pendidikan karakter yang bersumber dari sistem pendidikan nasional dan Pancasila akan meningkatkan jiwa patriotisme. Hasil karya digital yang fenomenal dari generasi milenial membuat nama Indonesia berkibar dalam kompetisi global. Dengan penguatan pendidikan karakter diharapkan dapat meningkatkan jiwa patriotisme sehingga akan mendukung kewaspadaan nasional.

Saran

Pertama, penguatan pendidikan karakter perlu diberikan kepada generasi milenial baik formal melalui sistem pendidikan nasional maupun informal untuk mempertebal jiwa patriotisme.

Kedua, mendorong dan memberdayakan generasi milenial untuk berkarya dalam bidang digital untuk kepentingan umat manusia diseluruh dunia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahan Ajar Bidang Studi Kewaspadaan Nasional, hal 54
2. https://www.kompasiana.com/latul/pendidikan-karakter-sebagai-pilar-kemajuan-bangsa-indonesia_590e79a6ad7e610206e6510f
3. <https://www.cermati.com/artikel/kenali-perbedaan-generasi-x-y-dan-z-dalam-berbelanja>
4. <https://rumahmilenials.com/siapa-itu-generasi-millennials/#.WttY-jX8xXIV>
5. <http://sinarharapan.net/2017/08/nasionalisme-pemuda-milenial/>
6. <http://kabaroke.com/presiden-penguatan-pendidikan-karakter-penting-untuk-generasi-milenial/>
7. <http://lib.untidar.ac.id/wp-content/uploads/2017/01/Pendidikan-Karakter-dalam-kurikulum.pdf>
8. <https://ristekdikti.go.id/siaran-pers-kemendikbud-penguatan-pendidikan-karakter-pintu-masuk-pembinaan-pendidikan-nasional/>
9. <https://inspiratorfreak.com/mengenal-4-karya-fenomenal-generasi-milenial/>

Galeri

Gubernur Lemhannas RI Memimpin Rapat Pantukir Calon PPRA LIX Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo memimpin rapat pantukir calon peserta Program Pendidikan Reguler (PPRA) Angkatan LIX di Gedung Trigatra Lt. I Lemhannas RI (9/1).



Gubernur Lemhannas RI Audensi dengan Konsil Dokter Indonesia

Konsil Dokter Indonesia bersama Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo setelah beraudiensi di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI (25/1).



Pelaksanaan Tes Urine Pegawai Lemhannas RI

Pegawai Lemhannas RI mengantre untuk menjalankan tes urin di lapangan tengah Lemhannas RI (14/1). Kegiatan ini merupakan partisipasi Lemhannas RI sebagai pencegahan penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di lingkungan lembaga.

Gubernur Menghadiri Bedah Buku Komjen Pol Suhardi Alius

Suasana pada Bedah Buku Komjen Pol Suhardi Alius di Auditorium Gajah Mada Lemhannas RI (14/1). Dalam acara tersebut, narasumber yang terlibat dalam bedah buku Kepala BNPT meliputi Guru Bangsa, Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif (Buya Syafii), Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A., Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Prof. H. Mohamad Nasir, Ph.D, Ak., Ketua Pansus DPR RI RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, H.R. Muhammad Syafi'i, SH, M.Hum, Guru Besar ITB, Ketua Pukat UGM, Direktur Utama MetroTV, dan Kepala BNPT..

Wawancara Gubernur Lemhannas RI dengan Pakar Psikologi

Pada 22 Maret 2019 pakar psikologi Indonesia bersama Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo didampingi oleh Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Sugeng Santoso dan Kepala Biro Kerjasama Settama Laksma TNI Budi Setiawan, S.T.



Gubernur Menteri Bapennas RI melakukan *Courtesy Call* dengan Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersama menteri Bapenas RI Bambang Permedi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D. saat beraudiensi di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI, Gedung Trigatra Lt. 1 (14/3).



Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) melakukan *Courtesy Call* dengan Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersama Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi saat beraudiensi di Ruang Tamu Gubernur Lemhannas RI, Gedung Trigatra Lt. 1 (14/3).





Gubernur Lemhannas RI Talkshow di RRI Semarang, pada 5 Maret 2019

Gubernur Lemhannas RI Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo bersama para narasumber dalam Talkshow Memilih Itu Juara: Pesta Demokrasi Jaman Now yang disiarkan di TVRI Jawa Tengah dan Radio Republik Indonesia. Selain Agus Widjojo, talkshow tersebut menghadirkan narasumber Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. Rektor Universitas Diponegoro, Yulianto Sudrajat Ketua KPU Jawa Tengah, dan Frederik Ndolu, S.Sos., M.Si., Dewan Pengawas LPP RRI (5/3).



Gubernur Lemhannas menjadi narasumber di Talkshow CNN

Gubernur Lemhannas RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo dalam Prime News CNN menjadi narasumber terkait dengan manajemen personalia TNI (8/3).



mengucapkan

SELAMAT MEMPERINGATI

ISRA MI'RAJ

NABI MUHAMMAD SAW

3 APRIL 2019

